

Wikiapbn

<http://www.wikiapbn.org>

**PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-80/PB/2011
TENTANG
PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN AKUN PENDAPATAN, BELANJA,
DAN TRANSFER PADA BAGAN AKUN STANDAR**

*Wikiapbn menjamin kesamaan salinan ini dengan dokumen aslinya,
asalkan diunduh dari alamat*

[http://www.wikiapbn.org/artikel/Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011](http://www.wikiapbn.org/artikel/Peraturan_Dirjen_Perbendaharaan_Nomor_PER-80/PB/2011)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-80 /PB/2011

TENTANG

PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN
AKUN PENDAPATAN, BELANJA, DAN TRANSFER
PADA BAGAN AKUN STANDAR

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, diperlukan Bagan Akun Standar yang lengkap dan mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban seluruh transaksi keuangan yang terjadi pada Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar dinyatakan bahwa Bagan Akun Standar selanjutnya dikelola/dikurangi/ditambah oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - c. bahwa ketentuan akun pendapatan, belanja, dan transfer sebagaimana yang diatur dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-08/PB/2009 tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar perlu disesuaikan kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer Pada Bagan Akun Standar;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-08/PB/2009 tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN AKUN PENDAPATAN, BELANJA, DAN TRANSFER PADA BAGAN AKUN STANDAR.

Pasal 1

Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar ini digunakan sebagai pedoman oleh setiap Kementerian Negara/Lembaga untuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Pelaporan Keuangan mulai Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini terdiri dari:

- a. kode dan uraian akun sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini;
- b. penjelasan penggunaan kode akun sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini;
- c. *mapping* perubahan kodifikasi dan uraian akun sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini;
- d. restrukturisasi akun pendapatan dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan pendapatan dari penjualan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini;
- e. restrukturisasi akun belanja bantuan sosial sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini;
- f. penambahan dan perubahan uraian/penjelasan akun sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini; dan
- g. akun yang tidak digunakan mulai Tahun Anggaran 2012 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Pasal 3

Bagan Akun Standar yang tidak diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-08/PB/2009 tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar.

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2011

DIREKTUR JENDERAL,




1 AGUS SUPRIJANTO
NIP 19530814 197507 1 001 

KODE DAN URAIAN AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	URAIAN
4	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
41	PENERIMAAN PERPAJAKAN
411	PENDAPATAN PAJAK DALAM NEGERI
4111	Pendapatan Pajak Penghasilan
41111	Pendapatan PPh Migas
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi
411112	Pendapatan PPh Gas Alam
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya
41112	Pendapatan PPh Non-Migas
411121	Pendapatan PPh Pasal 21
411122	Pendapatan PPh Pasal 22
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor
411124	Pendapatan PPh Pasal 23
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan
411127	Pendapatan PPh Pasal 26
411128	Pendapatan PPh Final
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya
41113	Pendapatan PPh Fiskal
411131	Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri
41114	Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah
411141	Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
411142	Pendapatan PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah
411143	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah
411144	Pendapatan PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah
411145	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Ditanggung Pemerintah
411146	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah
411147	Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah
411148	Pendapatan PPh Final Ditanggung Pemerintah
411149	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya Ditanggung Pemerintah
4112	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai
41121	Pendapatan PPN
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri
411212	Pendapatan PPN Impor
411219	Pendapatan PPN Lainnya
41122	Pendapatan PPnBM
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri
411222	Pendapatan PPnBM Impor
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya
4113	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
41131	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
411311	Pendapatan PBB Pedesaan

KODE DAN URAIAN AKUN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

AKUN	URAIAN
	411312 Pendapatan PBB Perkotaan
	411313 Pendapatan PBB Perkebunan
	411314 Pendapatan PBB Kehutanan
	411315 Pendapatan PBB Pertambangan
	411316 Pendapatan PBB Migas
4114	Pendapatan BPHTB
41141	Pendapatan BPHTB
	411411 Pendapatan BPHTB
4115	Pendapatan Cukai
41151	Pendapatan Cukai
	411511 Pendapatan Cukai Hasil Tembakau
	411512 Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol
	411513 Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol
	411514 Pendapatan Denda Administrasi Cukai
	411519 Pendapatan Cukai Lainnya
4116	Pendapatan Pajak Lainnya
41161	Pendapatan Pajak Lainnya
	411611 Pendapatan Bea Meterai
	411612 Pendapatan dari Penjualan Benda Materai
	411613 Pendapatan PPn Batubara
	411619 Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya
41162	Pendapatan Bunga Penagihan Pajak
	411621 Pendapatan Bunga Penagihan PPh
	411622 Pendapatan Bunga Penagihan PPN
	411623 Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM
	411624 Pendapatan Bunga Penagihan PTLL
41163	Pendapatan Pajak Lainnya Ditanggung Pemerintah
	411631 Pendapatan Bunga Penagihan PPh Ditanggung Pemerintah
412	PENDAPATAN PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
4121	Pendapatan Bea Masuk
41211	Pendapatan Bea Masuk
	412111 Pendapatan Bea Masuk
	412112 Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)
	412113 Pendapatan Denda Administrasi Pabean
	412114 Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
	412115 Denda Atas Sanksi Administrasi Dari Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang Tertentu Yang Pengangkutannya Di Dalam Daerah Pabean (Antar Pulau)
	412116 Pendapatan BM-DTP
	412119 Pendapatan Pabean Lainnya
4122	Pendapatan Bea Keluar
41221	Pendapatan Bea Keluar
	412211 Pendapatan Bea Keluar

KODE DAN URAIAN AKUN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

AKUN	URAIAN
	412212 Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar
	412213 Pendapatan Bunga Bea Keluar
42 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	
421 PENERIMAAN SUMBER DAYA ALAM	
4211 Pendapatan Minyak bumi	
42111 Pendapatan Minyak Bumi	
421111 Pendapatan Minyak Bumi	
4212 Pendapatan Gas Bumi	
42121 Pendapatan Gas Bumi	
421211 Pendapatan Gas Bumi	
4213 Pendapatan Pertambangan Umum	
42131 Pendapatan Pertambangan Umum	
421311 Pendapatan Iuran Tetap	
421312 Pendapatan Royalti	
4214 Pendapatan Kehutanan	
42141 Pendapatan Dana Reboisasi	
421411 Pendapatan Dana Reboisasi	
42142 Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	
421421 Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	
42143 Pendapatan IIUPH (IHPH)	
421431 Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Industri	
421432 Pendapatan IIUPH (IHPH) Bambu	
421433 Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Rotan	
421434 Pendapatan IIUPH (IHPH) Hutan Alam	
42144 Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan	
421441 Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan	
4215 Pendapatan Perikanan	
42151 Pendapatan Perikanan	
421511 Pendapatan Perikanan	
4216 Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	
42161 Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	
421611 Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	
422 PENDAPATAN BAGIAN LABA BUMN	
4221 Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	
42211 Pendapatan Laba BUMN Perbankan	
422111 Pendapatan Laba BUMN Perbankan	
42212 Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan	
422121 Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan	
423 PENDAPATAN PNBPN LAINNYA	
4231 Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	
42311 Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	

KODE DAN URAIAN AKUN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

AKUN	URAIAN
	423111 Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan
	423112 Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan
	423113 Pendapatan Penjualan Hasil Tambang
	423114 Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan
	423115 Pendapatan Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi Lainnya
	423116 Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya
	423117 Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan
	423118 Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni.
	423119 Pendapatan Penjualan Lainnya
42312	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN
	423121 Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan
	423122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
	423123 Pendapatan Penjualan Sewa Beli
	423124 Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing/Cina
	423125 Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan
	423126 Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin
	423127 Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan
	423129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
42313	Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas
	423131 Pendapatan Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak
	423132 Pendapatan Minyak Mentah (DMO)
	423139 Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas
42314	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN
	423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
	423142 Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin
	423143 Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan
	423144 Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan
	423145 Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin
	423146 Pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi dan Jaringan
	423147 Pendapatan dari Bangun, Guna, Serah (BGS)
	423148 Pendapatan dari Bangun, Serah, Guna (BSG)
	423149 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya
4232	Pendapatan Jasa
42321	Pendapatan Jasa I
	423211 Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya
	423212 Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA)
	423213 Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor
	423214 Pendapatan Hak dan Perijinan
	423215 Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan
	423216 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan Dan Teknologi Sesuai

KODE DAN URAIAN AKUN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

AKUN	URAIAN
	Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Dan Pendapatan DJBC
423217	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama
423218	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan, dan Kenavigasian
423219	Pendapatan Pelayanan Pertanahan
42322	Pendapatan Jasa II
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
423222	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi
423223	Pendapatan Iuran Lelang untuk Fakir Miskin
423224	Pendapatan Jasa Catatan Sipil
423225	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa
423226	Pendapatan Uang Pewarganegaraan
423227	Pendapatan Bea Lelang
423228	Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara
423229	Pendapatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi
42323	Pendapatan Jasa Luar Negeri
423231	Pendapatan dari Pemberian Surat Perjalanan RI
423232	Pendapatan dari Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler
423239	Pendapatan Rutin Lainnya dari Luar Negeri
42324	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan
423241	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan
42325	Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara
423251	Pendapatan atas Penertiban SP2D Dalam Rangka TSA
423252	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum
423253	Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional Pooling
423254	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia
42326	Pendapatan Jasa Kepolisian I
423261	Pendapatan Surat Izin Mengemudi (SIM)
423262	Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
423263	Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)
423264	Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
423265	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
423266	Pendapatan Ujian Ketrampilan Mengemudi Melalui Simulator
423267	Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak
42327	Pendapatan Jasa Pelayanan Jalan Tol
423271	Pendapatan Jasa Pelayanan Jalan Tol Suramadu
42328	Pendapatan Jasa Kepolisian II
423281	Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah
423282	Pendapatan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
423283	Pendapatan Penerbitan Surat Keterangan Lapori Diri
423284	Pendapatan Penerbitan Kartu Sidik Jari (Inafis Card)
423285	Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas

KODE DAN URAIAN AKUN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

AKUN	URAIAN
42329	Pendapatan Jasa Lainnya
423291	Pendapatan Jasa Lainnya
4233	Pendapatan Bunga
42331	Pendapatan Bunga
423311	Pendapatan Bunga atas Investasi dalam Obligasi
423312	Pendapatan PPA (eks BPPN) atas Bunga Obligasi
423313	Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman
423314	Pendapatan Bunga dari Pemberian Kredit Pemerintah
423315	Pendapatan Bunga dari Rekening Pembangunan Hutan
423319	Pendapatan Bunga Lainnya
42332	Pendapatan Gain on Bond Redemption
423321	Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang
423322	Pendapatan dari Transaksi Security Lending
42333	Pendapatan Premium atas Obligasi Negara
423331	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah
423332	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing
423333	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Negeri/Rupiah
423334	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Valuta Asing
42334	Pendapatan Fee Lainnya atas Transaksi Surat Berharga Negara
423341	Pendapatan atas Transaksi Security Lending SUN
4234	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi
42341	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi
423411	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan
423412	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan
423413	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)
423414	Pendapatan Hasil Denda dan sebagainya
423415	Pendapatan Ongkos Perkara
423416	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi
423417	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi
423419	Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya
4235	Pendapatan Pendidikan
42351	Pendapatan Pendidikan
423511	Pendapatan Uang Pendidikan
423512	Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan
423513	Pendapatan Uang Ujian untuk Menjalankan Praktek
423519	Pendapatan Pendidikan Lainnya
4236	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi
42361	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi
423611	Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Ditetapan Pengadilan

KODE DAN URAIAN AKUN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

AKUN	URAIAN
	423612 Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara
	423613 Pendapatan dari Pengembalian Penyalahgunaan Penyelenggaraan Keuangan
	423614 Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Yang Ditetapkan Di Pengadilan
	423615 Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara
4237	Pendapatan Iuran dan Denda
42371	Pendapatan Iuran Badan Usaha
	423711 Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM
	423712 Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
	423713 Iuran Badan Usaha di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
42372	Pendapatan Dana Pengamanan Hutan
	423721 Pendapatan Dana Pengamanan Hutan
42373	Pendapatan dari Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
	423731 Pendapatan Iuran Menangkap/Mengambil/Mengangkut Satwa Liar/Mengambil/Mengangkut Tumbuhan Alam Hidup
	423732 Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA)
	423733 Pungutan Izin Pengusahaan Taman Buru (PIPTB)
	423734 Pungutan Izin Berburu di Taman Buru dan Areal Buru (PIB)
	423735 Pungutan Masuk Obyek Wisata Alam
	423736 Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA)
	423737 Iuran Hasil Usaha Perburuan di Taman Buru (IHUPTB)
	423738 Pendapatan Penggantian Nilai Tegakan
42374	Pendapatan Penerimaan dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan
	423741 Pendapatan Penerimaan Dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan
42375	Pendapatan Denda
	423751 Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan
	423752 Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
	423753 Pendapatan Denda Administrasi BPHTB
	423754 Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal
	423755 Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha
	423756 Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA
	423757 Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Penempatan uang Negara di Bank Umum dan Bank Indonesia
	423758 Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Treasury Notional Pooling
	423759 Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi
42376	Pendapatan Denda II
	423761 Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Saldo BO II ke BO I
	423762 Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pembagian PBB oleh BO III

KODE DAN URAIAN AKUN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

AKUN	URAIAN
	PBB
4239	Pendapatan Lain-lain
42391	Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu
423911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL
423912	Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL
423913	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL
423914	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinj. LN TAYL
423915	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah TAYL
423916	Penerimaan Kembali Belanja Swadana TAYL
423917	Penerimaan Kembali Transfer Ke Daerah TAYL
42392	Pendapatan Pelunasan Piutang
423921	Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara
423922	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara
42393	Pendapatan dari Penutupan Rekening
423931	Pendapatan dari Penutupan Rekening
42394	Pendapatan dari Selisih kurs
423941	Pendapatan dari Selisih Kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUN
423942	Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI
42399	Pendapatan Lain-lain
423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji
423992	Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional
423993	Pendapatan dari Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL)
423994	Pendapatan dari Biaya Pengawasan HET Minyak Tanah
423995	Pendapatan Bagian Pemerintah dari Sisa Surplus Bank Indonesia
423996	Pendapatan Jasa Perbendaharaan
423997	Pendapatan Kelebihan Pelimpahan Pajak/PNBP dari Bank/Pos Persepsi
423998	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak
423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain
424	PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum
42411	Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi
424114	Pendapatan Jasa Pencetakan
424115	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian
424116	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi
424117	Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran
424118	Pendapatan Penyediaan Barang
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya

KODE DAN URAIAN AKUN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

AKUN	URAIAN
42412	Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu
424121	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita
424122	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
424123	Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah
424129	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya
42413	Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat
424131	Pendapatan Program Dana Penjaminan
424132	Pendapatan Program Dana Penjaminan Syariah
424133	Pendapatan Program Modal Ventura
424134	Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral
424135	Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah
424136	Pendapatan Investasi
424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya
4242	Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum
42421	Pendapatan Hibah Terikat
424211	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan
424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha
424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda
424214	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Perorangan
424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha
424216	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Negara
424219	Pendapatan Hibah Terikat Lainnya
42422	Pendapatan Hibah Tidak Terikat
424221	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan
424222	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha
424223	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda
424224	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Perorangan
424225	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha
424226	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Negara
424229	Pendapatan Hibah Tidak Terikat -Lainnya
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU
42431	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha
424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah
4249	Pendapatan BLU Lainnya
42491	Pendapatan BLU Lainnya
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
424912	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang dibatasi pengelolaannya
43	PENERIMAAN HIBAH
431	PENDAPATAN HIBAH DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
4311	Pendapatan Hibah Dalam Negeri

KODE DAN URAIAN AKUN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

AKUN	URAIAN
43111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Terencana
431111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana Perorangan
431112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana Lembaga/Badan Usaha
431119	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana Lainnya
43112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga
431121	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Barang
431122	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Jasa
431123	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Surat Berharga
43113	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Uang
431131	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Perorangan
431132	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Lembaga/Badan Usaha
431133	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Pemerintah Daerah
431139	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Lainnya
4312	Pendapatan Hibah Luar Negeri
43121	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana
431211	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Perorangan
431212	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Bilateral
431213	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Multilateral
431219	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Lainnya
43122	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga
431221	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Barang
431222	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Jasa
431223	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Surat Berharga
43123	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang
431231	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Perorangan
431232	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Bilateral
431233	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Multilateral
431239	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Lainnya
43124	Pendapatan Hibah Luar Negeri yang Langsung Diterushibahkan
431241	Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Barang yang Langsung Diterushibahkan
431242	Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Jasa yang Langsung Diterushibahkan
431243	Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Surat Berharga yang Langsung Diterushibahkan

KODE DAN URAIAN AKUN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

AKUN	URAIAN
5 BELANJA NEGARA	
51 BELANJA PEGAWAI	
511 BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN	
5111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	
51111 Belanja Gaji PNS	
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	
51112 Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS	
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	
511127 Belanja Tunj. Kemahalan PNS	
511128 Belanja Tunj. Lauk pauk PNS	
511129 Belanja Uang Makan PNS	
51113 Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS	
511131 Belanja Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS	
511132 Belanja Tunj. Cacat PNS	
511133 Belanja Tunj. Khusus Peralihan PNS	
511134 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	
511135 Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	
511136 Belanja Tunj. Guru/Dosen/PNS Yang Dipekerjakan Pada Sekolah/PT Swasta/Badan/Komisi	
511137 Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS	
511138 Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	
511139 Belanja Tunjangan SAR PNS	
51114 Belanja Tunjangan-tunjangan III Pegawai Negeri/Staff di Luar Negeri	
511141 Belanja Tunj. Sewa Rumah PNS (Staff di LN)	
511142 Belanja Tunj. Restitusi Pengobatan PNS (Staff di LN)	
511143 Belanja Tunj. Social Security PNS (Staff di LN)	
511144 Belanja Tunj. Asuransi Kecelakaan PNS (Staff di LN)	
511145 Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (Staff di LN)	
511146 Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (Staff di LN)	
511147 Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri	
511149 Belanja Lokal Staff Lainnya	
51115 Belanja Tunjangan Tunjangan IV PNS	
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	
511152 Belanja Tunjangan Profesi Guru	
511153 Belanja Tunjangan Profesi Dosen	
511154 Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	

KODE DAN URAIAN AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	URAIAN
	511155 Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS
	511156 Belanja Tunjangan Khusus Guru/Dosen
51116	Belanja Gaji- PNS TNI/Polri
	511161 Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri
	511169 Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri
51117	Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS TNI/Polri
	511171 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri
	511172 Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri
	511173 Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri
	511174 Belanja Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri
	511175 Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri
	511176 Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri
	511177 Belanja Tunj. Kemahalan PNS TNI/Polri
	511178 Belanja Tunj. Lauk pauk PNS TNI/Polri
	511179 Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri
51118	Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS TNI/Polri
	511181 Belanja Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS TNI/Polri
	511182 Belanja Tunj. Cacat PNS TNI/Polri
	511183 Belanja Tunj. Khusus Peralihan PNS TNI/Polri
	511184 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS TNI/Polri
	511185 Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS TNI/Polri
	511187 Belanja Tunj. Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS TNI/Polri
	511188 Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS
	511189 Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS TNI/Polri
51119	Belanja Tunjangan-tunjangan III PNS TNI/POLRI
	511191 Belanja Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI
	511192 Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS TNI/POLRI
	511193 Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri
	511194 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/Polri
	511195 Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan pada pulau terluar dan wilayah perbatasan PNS TNI
5112	Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri
51121	Belanja Gaji TNI/POLRI
	511211 Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI
	511219 Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI
51122	Belanja Tunjangan-tunjangan I TNI/POLRI
	511221 Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI
	511222 Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI
	511223 Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI
	511224 Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI
	511225 Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI

KODE DAN URAIAN AKUN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

AKUN	URAIAN
	511226 Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI
	511227 Belanja Tunj. Kemahalan TNI/POLRI
	511228 Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI
	511229 Belanja Uang Makan TNI/POLRI
51123	Belanja Tunjangan-tunjangan II TNI/POLRI
	511231 Belanja Tunj. Anggota Cadangan TNI DDA TNI/POLRI
	511232 Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI
	511233 Belanja Tunj. BabinkamtibmasTNI/POLRI
	511234 Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI/POLRI
	511235 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/POLRI
	511236 Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI
	511237 Belanja Tunj. Keahlian/Keterampilan TNI/POLRI
	511238 Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNI/POLRI
	511239 Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan pada Pulau Terluar dan Wilayah Perbatasan TNI
51124	Belanja Tunjangan-tunjangan III TNI/POLRI
	511241 Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI
	511242 Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka TNI/POLRI
	511243 Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil TNI/Polri
	511244 Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri
	511245 Belanja Santunan Cacat TNI
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara
	51131 Belanja Gaji Pejabat Negara
	511311 Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara
	511319 Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara
	51132 Belanja Tunjangan-tunjangan I Pejabat Negara
	511321 Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara
	511322 Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara
	511323 Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara
	511324 Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara
	511325 Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara
	51133 Belanja Tunjangan-tunjangan II Pejabat Negara
	511331 Belanja Tunj. Komunikasi Intensif Pejabat Negara
	511332 Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara
	511333 Belanja Uang Paket Harian Pejabat Negara
	511334 Belanja Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan Pejabat Negara
	511335 Belanja Pelayanan Sidang dan Penyelesaian Tugas Mendesak Pejabat Negara
	511336 Belanja Tunjangan Pembinaan Kegiatan dan Khusus BPK Pejabat Negara
	511337 Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka Pejabat Negara
	511338 Belanja Tunjangan Fasilitas KPK
5114	Belanja Gaji Dokter PTT
	51141 Belanja Gaji Dokter PTT

KODE DAN URAIAN AKUN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

AKUN	URAIAN
	511411 Belanja Gaji Dokter dan Bidan PTT
	511412 Belanja Tunjangan Pajak PPh Dokter dan Bidan PTT
	511413 Belanja Tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT
	511414 Belanja Tunjangan Dokter dan Bidan PTT
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS
51151	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS
511511	Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS
511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS
511513	Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS
511519	Belanja Tunjangan Lainnya Non PNS
512	BELANJA HONORARIUM/LEMBUR/VAKASI/TUNJ. KHUSUS & BELANJA PEGAWAI TRANSITO
5121	Belanja Honorarium
51211	Belanja Honorarium
512111	Belanja Uang Honor Tetap
5122	Belanja Lembur
51221	Belanja Lembur
512211	Belanja Uang Lembur
5123	Belanja Vakasi
51231	Belanja Vakasi
512311	Belanja Vakasi
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito
51241	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)
512412	Belanja Pegawai Transito
512413	Belanja Pembayaran Uang Kompensasi Bagi PNS yang Diberhentikan Sebagai Dampak Reformasi Birokrasi
513	BELANJA KONTRIBUSI SOSIAL
5131	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu
51311	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS dan Pejabat Negara
513111	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS
513112	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Daerah
513113	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS TNI/Kemhan
513114	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Polri
513115	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Eks Pegadaian
51312	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri
513121	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri (Lama)
513122	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Kemhan
513123	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Polri
51313	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara
513131	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara
513132	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Hakim
51314	Belanja Kontribusi APBN sebagai pendanaan bersama dalam pembayaran pensiun eks PNS Kemhub pada PT KAI

KODE DAN URAIAN AKUN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

AKUN	URAIAN
	513141 Kontribusi APBN Sebagai Pendanaan Bersama Dalam Pembayaran Pensiun Eks PNS Kemhub pada PT KAI
51315	Belanja Pensiun Veteran dan PKRI/KNIP
	513151 Belanja Tunjangan Veteran
	513152 Belanja Dana Kehormatan Veteran
	513153 Belanja Tunjangan PKRI dan KNIP
51316	Belanja Tunjangan Hari Tua
	513161 Belanja Tunjangan Hari Tua (Unfunded Liability)
5132	Belanja Asuransi Kesehatan
51321	Belanja Askes PNS/Pejabat Negara
	513211 Belanja Askes PNS
	513212 Belanja Askes Pejabat Negara
51322	Belanja Askes Penerima Pensiun
	513221 Belanja Askes Penerima Pensiun
51323	Belanja Askes TNI/Kemhan
	513231 Belanja Askes TNI/Kemhan
51324	Belanja Askes Polri
	513241 Belanja Askes Polri
51325	Belanja Askes Veteran
	513251 Belanja Askes Veteran
5133	Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran
51331	Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran
	513311 Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran Non Tuvet
5134	Belanja Cadangan Perubahan Sharing
	51341 Belanja Cadangan Perubahan Sharing
	513411 Belanja Cadangan Perubahan Sharing
52	BELANJA BARANG
521	BELANJA BARANG
5211	Belanja Barang Operasional
52111	Belanja Barang Operasional
	521111 Belanja Keperluan Perkantoran
	521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan
	521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
	521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
	521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
5212	Belanja Barang Non Operasional
52121	Belanja Barang Non Operasional
	521211 Belanja Bahan
	521212 Belanja Barang Transito
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan
	521214 Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI/Atase Teknis

KODE DAN URAIAN AKUN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

AKUN	URAIAN
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
5215	Belanja Barang Pengganti Pajak Dalam Rangka Hibah MCC
52151	Belanja Barang Pengganti Pajak Pusat Dalam Rangka Hibah MCC
521511	Belanja Barang Pengganti PPN Dalam Rangka Hibah MCC
521512	Belanja Barang Pengganti PPh Dalam Rangka Hibah MCC
521513	Belanja Barang Pengganti Pajak Lainnya Dalam Rangka Hibah MCC
52152	Belanja Barang Pengganti Pajak Pemda Dalam Rangka Hibah MCC
521521	Belanja Barang Pengganti Pajak Pemda Dalam Rangka Hibah MCC
5216	Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah
52161	Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah
521611	Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah
522	BELANJA JASA
5221	Belanja Jasa
52211	Belanja Langganan Daya dan Jasa
522111	Belanja Langganan Listrik
522112	Belanja Langganan Telepon
522113	Belanja Langganan Air
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya
52212	Belanja Jasa Pos dan Giro
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro
52213	Belanja Jasa Konsultan
522131	Belanja Jasa Konsultan
52214	Belanja Sewa
522141	Belanja Sewa
52215	Belanja Jasa Profesi
522151	Belanja Jasa Profesi
52219	Belanja Jasa Lainnya
522191	Belanja Jasa Lainnya
5223	Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah
52231	Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah
522311	Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah
523	BELANJA PEMELIHARAAN
5231	Belanja Pemeliharaan
52311	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
52312	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
523129	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
52313	Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
523131	Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
523132	Belanja Biaya Pemeliharaan Irigasi

KODE DAN URAIAN AKUN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

AKUN	URAIAN
	523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan
	52319 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya
	523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya
524 BELANJA PERJALANAN	
5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri	
52411 Belanja Perjalanan Dalam Negeri	
	524111 Belanja Perjalanan Biasa
	524112 Belanja Perjalanan Tetap
	524119 Belanja Perjalanan Lainnya
5242 Belanja Perjalanan Luar Negeri	
52421 Belanja Perjalanan Luar Negeri	
	524211 Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri
	524212 Belanja Perjalanan Tetap - Luar Negeri
	524219 Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri
525 BELANJA BADAN LAYANAN UMUM (BLU)	
5251 Belanja Barang BLU	
52511 Belanja Barang dan Jasa BLU	
	525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
	525112 Belanja Barang
	525113 Belanja Jasa
	525114 Belanja Pemeliharaan
	525115 Belanja Perjalanan
	525116 Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund
	525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
526 BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMDA	
5261 Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	
52611 Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	
	526111 Belanja Tanah Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
	526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
	526113 Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
	526114 Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
	526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
5262 Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah	
52621 Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada pemerintah daerah	
	526211 Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah
	526212 Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah
5263 Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	
52631 Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	
	526311 Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda

KODE DAN URAIAN AKUN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

AKUN	URAIAN
531	BELANJA MODAL TANAH
5311	Belanja Modal Tanah
53111	Belanja Modal Tanah
531111	Belanja Modal Tanah
531112	Belanja Modal Pembebasan Tanah
531113	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah
531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah
531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
531116	Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah
531117	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5312	Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari Hibah
53121	Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari Hibah
531211	Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari Hibah
532	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
53211	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
532112	Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin
532113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
532114	Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin
532115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin
532116	Belanja Modal Perijinan Peralatan dan Mesin
532117	Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin
532118	Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin
53212	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin
5322	Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan Peralatan dan Mesin dari Hibah
53221	Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan Peralatan dan Mesin dari Hibah
532211	Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan Peralatan dan Mesin dari Hibah
533	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
53311	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
533112	Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan
533114	Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan
533116	Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan
533117	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Gedung dan Bangunan

KODE DAN URAIAN AKUN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

AKUN	URAIAN
	533118 Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan
53312	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
	533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
5332	Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Pencatatan Gedung dan Bangunan dari Hibah
53321	Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Pencatatan Gedung dan Bangunan dari Hibah
	533211 Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Pencatatan Gedung dan Bangunan dari Hibah
534	BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
53411	Belanja Modal Jalan dan Jembatan
	534111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan
	534112 Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan
	534113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan jembatan
	534114 Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan
	534115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan
	534116 Belanja Modal Perijinan Jalan dan Jembatan
	534117 Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Jalan dan Jembatan
	534118 Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan
53412	Belanja Modal Irigasi
	534121 Belanja Modal Irigasi
	534122 Belanja Modal Bahan Baku Irigasi
	534123 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi
	534124 Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi
	534125 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi
	534126 Belanja Modal Perijinan Irigasi
	534127 Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Irigasi
	534128 Belanja Modal Perjalanan Irigasi
53413	Belanja Modal Jaringan
	534131 Belanja Modal Jaringan
	534132 Belanja Modal Bahan Baku Jaringan
	534133 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan
	534134 Belanja Modal Sewa Peralatan Jaringan
	534135 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan
	534136 Belanja Modal Perijinan Jaringan
	534137 Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Jaringan
	534138 Belanja Modal Perjalanan Jaringan
53414	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan
	534141 Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan
53415	Belanja Penambahan Nilai Irigasi
	534151 Belanja Penambahan Nilai Irigasi
53416	Belanja Penambahan Nilai Jaringan

KODE DAN URAIAN AKUN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

AKUN	URAIAN
	534161 Belanja Penambahan Nilai Jaringan
5342	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah
	53421 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah
	534211 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah
536	BELANJA MODAL LAINNYA
	5361 Belanja Modal Lainnya
	53611 Belanja Modal Lainnya
	536111 Belanja Modal Lainnya
	53612 Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya
	536121 Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya
5362	Belanja Modal Lainnya untuk Pencatatan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari Hibah
	53621 Belanja Modal Lainnya untuk Pencatatan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari Hibah
	536211 Belanja Modal Lainnya untuk Pencatatan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari Hibah
537	BELANJA MODAL BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
	5371 Belanja Modal BLU
	53711 Belanja Modal BLU
	537111 Belanja Modal Tanah - BLU
	537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
	537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU
	537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU
	537115 Belanja Modal Lainnya - BLU
54	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG
	541 BELANJA PEMBAYARAN BUNGA UTANG
	5411 Belanja Pembayaran Bunga Utang DN – Jangka Pendek
	54111 Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara
	541111 Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara – Rupiah
	541119 Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Surat Perbendaharaan Negara
	5412 Belanja Pembayaran Bunga Utang DN – Jangka Panjang
	54121 Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara
	541211 Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Rupiah
	541219 Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Obligasi Negara
	54122 Belanja Pembayaran Bunga Dalam Negeri Jangka Panjang Lainnya
	541221 Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan
	541229 Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Obligasi Negara Lainnya
	54123 Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri
	541231 Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri
	541232 Belanja Biaya/Kewajiban Lainnya terhadap Pinjaman DN
5413	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri

KODE DAN URAIAN AKUN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

AKUN	URAIAN
54131	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang
541311	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang
541312	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Panjang
54132	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek
541321	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek
541322	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Pendek
54133	Belanja Pembayaran Imbalan SPN Syariah
541331	Belanja Pembayaran Imbalan SPN Syariah
541332	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya-Imbalan SPN Syariah
5414	Belanja Pembayaran Bunga Utang LN – Jangka Panjang
54141	Belanja Bunga Pinjaman program
541411	Belanja Bunga Pinjaman Program
541419	Belanja Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program
54142	Belanja Bunga Pinjaman proyek
541421	Belanja Bunga Pinjaman Proyek
541429	Belanja Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek
54143	Belanja Bunga Obligasi Negara
541431	Belanja Bunga Obligasi Negara – Valas
541439	Belanja Biaya/kewajiban Lainnya – Bunga Obligasi Negara
54144	Belanja Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman
541441	Belanja Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Program
541442	Belanja Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Proyek
541449	Belanja Biaya/Kewajiban Lainnya – Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman
54145	Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara
541451	Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara – Valuta Asing
541459	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Bunga Surat Perbendaharaan Negara
5415	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri
54151	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang
541511	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang - Valas
541519	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Imbalan SBSN Jangka Panjang - Valas
54152	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek
541521	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek - Valas
541529	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Imbalan SBSN Jangka Pendek - Valas
542	BELANJA PEMBAYARAN DISCOUNT SURAT UTANG NEGARA DALAM NEGERI
5421	Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri
54211	Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri
542111	Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri
542119	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri

KODE DAN URAIAN AKUN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

AKUN	URAIAN
54212	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri
542121	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri
542129	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Obligasi Negara Dalam Negeri
543	BELANJA PEMBAYARAN DISCOUNT SURAT UTANG NEGARA LUAR NEGERI
5431	Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Luar Negeri
54311	Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri
543111	Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri
543119	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri
54312	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri
543121	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri
543129	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Obligasi Negara Luar Negeri
544	BELANJA PEMBAYARAN LOSS ON BOND REDEMPTION
5441	Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Dalam
54411	Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Dalam Negeri
544111	Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Dalam Negeri
545	BELANJA PEMBAYARAN DISCOUNT SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA DALAM NEGERI
5451	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Bertahap Syariah Negara Dalam Negeri
54511	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Panjang
545111	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Panjang
545119	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount SBSN Jangka Panjang
54512	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Pendek
545121	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Pendek
545129	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount SBSN Jangka Pendek
54513	Belanja Pembayaran Discount SPN
545131	Belanja Pembayaran Discount SPN
545139	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya-Discoutn SPN
546	BELANJA PEMBAYARAN DISCOUNT SURAT BERTAHAP SYARIAH NEGARA LUAR NEGERI
5461	Belanja Pembayaran Discount Surat Bertahap Syariah Negara Luar Negeri
54611	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Panjang
546111	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Panjang - Valas
546119	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount SBSN Jangka Panjang - Valas
54612	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Pendek
546121	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Pendek - Valas
546129	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount SBSN Jangka Pendek - Valas
547	BELANJA DENDA
5471	Belanja Pembayaran Denda

KODE DAN URAIAN AKUN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

AKUN	URAIAN
54711	Belanja Pembayaran Imbalan Bunga
547111	Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Pajak (SPM-IB Pajak)
547112	Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan
547113	Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Bea dan Cukai (SPM-IB Bea dan Cukai)
547119	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Bunga Dalam Negeri Jangka Pendek Lainnya
548	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN/UTANG
5481	Belanja Terkait Pendapatan Hibah
54811	Belanja Terkait Pendapatan Hibah
548111	Belanja Terkait Pendapatan Hibah
55	BELANJA SUBSIDI
551	BELANJA SUBSIDI PERUSAHAAN NEGARA
5511	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
55111	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
551111	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
5512	Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan – BBM
55121	Belanja Subsidi BBM
551211	Belanja Subsidi Avgas
551212	Belanja Subsidi Avtur
551213	Belanja Subsidi Premium
551214	Belanja Subsidi Minyak Bakar
551215	Belanja Subsidi Minyak Solar
551216	Belanja Subsidi Minyak Diesel
551217	Belanja Subsidi Minyak Tanah
551218	Belanja Subsidi Elpiji
5513	Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan – Non BBM
55131	Belanja Subsidi Non-BBM – Harga/Biaya
551311	Belanja Subsidi Pangan
551312	Belanja Subsidi Listrik
551313	Belanja Subsidi Benih
551314	Belanja Subsidi Obat
551315	Belanja Subsidi Gula
551316	Belanja Subsidi Pupuk
551317	Belanja Subsidi Perawatan Beras
551318	Belanja Subsidi Pengawasan Pupuk
551319	Belanja Subsidi Harga/Biaya Lainnya
55132	Belanja Subsidi Non-BBM – Pajak
551321	Belanja Subsidi PPh-DTP
551323	Belanja Subsidi BM-DTP
55133	Belanja Subsidi Non-BBM – Lainnya
551331	Belanja Subsidi Haji
551332	Belanja Subsidi Kendaraan Bermotor

KODE DAN URAIAN AKUN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

AKUN	URAIAN
	551339 Belanja Subsidi Lainnya
55134	Belanja Subsidi Non BBM - Harga/Biaya II
	551341 Belanja Subsidi Minyak Goreng
5514	Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan – PSO
55141	Belanja Subsidi dalam rangka PSO
	551411 Belanja Subsidi PT KAI
	551412 Belanja Subsidi PT PELNI
	551413 Belanja Subsidi PT Pos Indonesia
	551414 Belanja Subsidi TVRI
	551415 Belanja Subsidi BULOG
	551419 Belanja Subsidi Dalam Rangka PSO Lainnya
552	BELANJA SUBSIDI PERUSAHAAN SWASTA
5521	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
55211	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
	552111 Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
55212	Belanja Subsidi – Bunga Kredit
	552121 Belanja Subsidi Bunga KUT
	552122 Belanja Subsidi Bunga KOP PIR
	552123 Belanja Subsidi Bunga KOP
	552124 Belanja Subsidi Bunga KOP PRIM
	552125 Belanja Subsidi Bunga KPR
	552126 Belanja Subsidi Bunga Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi
	552127 Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Eks KLBI
	552128 Belanja Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)
	552129 Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya
55213	Belanja Subsidi Imbalan Jasa Peminjam dan Risk Sharing
	552131 Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
	552132 Belanja Subsidi Risk Sharing KKP dan Energi
55214	Belanja Subsidi Kredit Program II
	552141 Belanja Subsidi Bunga Pengusaha NAD dan Nias
	552142 Belanja Subsidi Kredit Sektor Peternakan
	552143 Belanja Subsidi Kredit Resi Gudang
5522	Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan
55221	Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan
	552211 Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan
56	BELANJA HIBAH
561	BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH LUAR NEGERI
5611	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
	56111 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
	561111 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
562	BELANJA HIBAH KEPADA ORGANISASI INTERNASIONAL
5621	Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional

KODE DAN URAIAN AKUN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

AKUN	URAIAN
	56211 Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
	562111 Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
563 BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH	
5631 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah	
56311 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah	
	563111 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
56312 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah	
	563121 Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri
	563122 Belanja Hibah Jasa Kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri
	563123 Belanja Hibah Surat Berharga Kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri
564 BELANJA HIBAH KEPADA ORGANISASI DALAM NEGERI	
5641 Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri	
	56411 Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri
	564111 Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri
57 BELANJA BANTUAN SOSIAL	
571 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK REHABILITASI SOSIAL	
5711 Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	
	57111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial
	571111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang
	571112 Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa
572 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK JAMINAN SOSIAL	
5721 Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	
	57211 Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial
	572111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang
	572112 Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa
573 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBERDAYAAN SOSIAL	
5731 Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	
	57311 Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial
	573111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang
	573112 Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa
574 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL	
5741 Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	
	57411 Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial
	574111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang
	574112 Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa
575 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN	
5751 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	
	57511 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan
	575111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang
	575112 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk

KODE DAN URAIAN AKUN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

AKUN	URAIAN
	Barang/Jasa
576	BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA
5761	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana
57611	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana
576111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang
576112	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Barang/Jasa
58	BELANJA LAIN-LAIN
581	BELANJA LAIN-LAIN
5811	Belanja Lain-lain Dana Cadangan
58111	Belanja Lain-lain Cadangan I
581111	Belanja Cadangan Umum
581112	Belanja Cadangan Tanggap Darurat (Dana Kontijensi)
581113	Belanja Cadangan Dana Reboisasi
581114	Belanja Cadangan Tunjangan Beras PNS/TNI/Polri
581115	Belanja Cadangan Kenaikan Harga Tanah (Land Capping)
581116	Belanja Cadangan Risiko Perubahan Asumsi Makro
581117	Belanja Cadangan Stabilisasi Harga Pangan
581118	Belanja Cadangan Risiko Lifting
581119	Belanja Cadangan Lainnya
58112	Belanja Lain-lain Cadangan II
581121	Belanja Cadangan Fiskal Lainnya (Risiko Kenaikan TTL Listrik)
581122	Belanja Cadangan Beras Pemerintah
581123	Belanja Cadangan Benih Nasional
5812	Belanja Lain-lain Lembaga Non Kementerian
58121	Belanja Lain-lain Lembaga Non Kementerian
581211	Belanja Lain-lain Lembaga Non Kementerian
5813	Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN
58131	Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN
581311	Belanja Fee Pelayanan Bank/Pos Persepsi
581312	Jasa Surveyor
581313	Jasa Perbendaharaan
581314	Jasa Pelayanan Bank Operasional
581315	Belanja Jasa Pelayanan Perbendaharaan
581316	Belanja Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog
581319	Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN Lainnya
5814	Belanja Lain-lain BUN
58141	Belanja Lain-lain BUN
581411	Belanja Iuran ke Lembaga Internasional
581412	Belanja Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua
581413	Belanja Tunggakan dan Klaim Pihak Ketiga
581414	Belanja Dana Penunjang (PHLN)

KODE DAN URAIAN AKUN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

AKUN	URAIAN
	581415 Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN
	581416 Belanja Penugasan PT SMI
	581417 Belanja Kompensasi Kenaikan Harga BBM
	581418 Belanja Konversi BBM ke BBG untuk Transportasi Umum
	581419 Belanja Lain-lain BUN Lainnya
5815	Belanja Lain-lain Tanggap Darurat
58151	Belanja Lain-lain Tanggap Darurat
	581511 Belanja Keperluan Mendesak/Tak Terduga
	581512 Belanja Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
5819	Belanja Lain-lain Lainnya
58191	Belanja Lain-lain Lainnya
	581911 Belanja Pemilu
	581919 Belanja Lain-lain

KODE DAN URAIAN AKUN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

AKUN	URAIAN
6	TRANSFER KE DAERAH
61	TRANSFER DANA BAGI HASIL
611	TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
6111	Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan
61111	Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan
611111	Transfer DBH PPh Pasal 21
611112	Transfer DBH PPh Pasal 25/29 OP
6112	Transfer Dana bagi hasil PBB
61121	Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
611211	Transfer DBH PBB untuk Propinsi
611212	Transfer DBH PBB untuk Kabupaten/Kota
611213	Transfer DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi
611214	Transfer DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/Kota
611215	Transfer DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dikembalikan Sama Rata ke Kabupaten/Kota
611216	Transfer DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dikembalikan sebagai Insentif PBB ke Kabupaten/Kota
612	TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
6121	Transfer DBH-SDA Minyak Bumi
61211	Transfer Dana Bagi Hasil Minyak Bumi
612111	Transfer DBH Minyak Bumi
612112	Transfer DBH Minyak Bumi 0.5%
612113	Tambahan Transfer DBH Minyak Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus
6122	Transfer DBH-SDA Gas Bumi
61221	Transfer Dana Bagi Hasil Gas Bumi
612211	Transfer DBH Gas Bumi
612212	Transfer DBH Gas Bumi 0.5%
612213	Tambahan Transfer DBH Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus
6123	Transfer DBH-SDA Pertambangan Umum
61231	Transfer Dana Bagi Hasil-SDA Pertambangan Umum
612311	Transfer DBH Pertambangan Umum - Iuran Tetap
612312	Transfer DBH Pertambangan Umum - Royalti
6124	Transfer DBH-SDA Pertambangan Panas Bumi
61241	Transfer Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi
612411	Transfer DBH Pertambangan Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah
612412	Transfer DBH Pertambangan Panas Bumi - Iuran Tetap
612413	Transfer DBH Pertambangan Panas Bumi - Iuran Produksi (Royalti)
6125	Transfer DBH-SDA Kehutanan
61251	Transfer Dana Bagi Hasil Kehutanan
612511	Transfer DBH Kehutanan - IIUPH/IHPH
612512	Transfer DBH Kehutanan - PSDH
612513	Transfer DBH Kehutanan - Dana Reboisasi
6126	Transfer DBH Perikanan

KODE DAN URAIAN AKUN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

AKUN	URAIAN
	61261 Transfer Dana Bagi Hasil Perikanan
	612611 Transfer DBH Perikanan
613 TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI	
6131 Transfer Dana Bagi Hasil Cukai	
61311 Transfer Dana Bagi Hasil Cukai	
613111 Transfer DBH Cukai Hasil Tembakau	
62 TRANSFER DANA ALOKASI UMUM	
621 TRANSFER DANA ALOKASI UMUM	
6211 Transfer Dana Alokasi Umum	
62111 Transfer Dana Alokasi Umum	
621111 Transfer DAU	
621114 Transfer Koreksi DAU	
63 TRANSFER DANA ALOKASI KHUSUS	
631 TRANSFER DANA ALOKASI KHUSUS	
6311 Transfer Dana Alokasi Khusus	
63111 Transfer Dana Alokasi Khusus	
631111 Transfer DAK	
631113 Transfer Koreksi DAK	
64 TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS	
641 TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS	
6411 Transfer Dana Otonomi Khusus Aceh	
64111 Transfer Dana Otonomi Khusus Aceh	
641111 Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	
6412 Transfer Dana Otonomi Khusus Papua	
64121 Transfer Dana Otonomi Khusus Papua	
641211 Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	
641212 Transfer Dana Tambahan Infrastruktur Papua	
6413 Transfer Dana Otonomi Khusus Papua Barat	
64131 Transfer Dana Otonomi Khusus Papua Barat	
641311 Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	
641312 Transfer Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	
65 TRANSFER DANA PENYESUAIAN	
651 TRANSFER DANA PENYESUAIAN I	
6511 Transfer Dana Penyesuaian I	
65111 Transfer Dana Penyesuaian I	
651119 Transfer Dana Penyesuaian Lainnya	
652 TRANSFER DANA PENYESUAIAN II	
6521 Transfer Dana Penyesuaian II	
65211 Transfer Dana Penyesuaian II	
652111 Transfer Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah	
652112 Transfer Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	

KODE DAN URAIAN AKUN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

AKUN	URAIAN
	652113 Transfer Dana Kurang Bayar Dana Alokasi Khusus (DAK)
	652114 Transfer Dana Kurang Bayar Dana Penyesuaian infrastruktur Jalan dan Lainnya (DPIL)
	652115 Transfer Dana Insentif Daerah (DID)
	652116 Transfer Dana Kurang Bayar Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana (DISP)
	652117 Transfer Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIP)
	652118 Transfer Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP)
653	TRANSFER DANA PENYESUAIAN III
6531	Transfer Dana Penyesuaian III
65311	Transfer Dana Penyesuaian III
653111	Transfer Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)
653112	Transfer Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
653113	Transfer Dana Penyesuaian Insfrastruktur Daerah (DPID)
653114	Transfer Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID)
653115	Transfer Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)

DIREKTUR JENDERAL,

AGUS SUPRIJANTO
NIP 19530814 197507 1 001

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
 DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
4	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
41	PENERIMAAN PERPAJAKAN
411	PENDAPATAN PAJAK DALAM NEGERI
4111	Pendapatan Pajak Penghasilan
41111	Pendapatan PPh Migas
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi
	Penerimaan yang berasal dari PPh minyak bumi yang terdiri dari: - Setoran PPhMinyak Bumi; - Surat Tagihan Pajak (STP); - SKPKB PPh Minyak Bumi; dan - SKPKBT PPh Minyak Bumi.
411112	Pendapatan PPh Gas Alam
	Kode MAP ini digunakan untuk menampung penerimaan ke kas negara yang berasal PPh gas alam yang terdiri dari : · Setoran PPh Gas Bumi; · Surat Tagihan Pajak (STP); · SKPKB PPh Gas Bumi; dan · SKPKBT PPh Gas Bumi.
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya
	Penerimaan yang berasal dari PPh Lainnya yang dihasilkan dari kegiatan penambangan Gas Alam, yang terdiri dari : · Setoran PPh Lainnya dari Gas Bumi; · Surat Tagihan Pajak (STP) Lainnya dari Gas Bumi; · SKPKB PPh Lainnya dari Gas Bumi; dan · SKPKBT PPh Lainnya dari Gas Bumi.
41112	Pendapatan PPh Non-Migas
411121	Pendapatan PPh Pasal 21
	Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran: · Masa/Angsuran Tahunan; · Surat Tagihan Pajak (STP); · PPh Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon; · Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); · SKPKB PPh Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon; · Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); dan · SKPKBT PPh Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang pesangon.
411122	Pendapatan PPh Pasal 22
	Penerimaan dari transaksi dalam negeri yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah dirubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran: · Masa; · PPh Penebusan Migas; · PPh Penyerahan Rokok Produksi Dalam Negeri; · PPh yang dipungut Bendaharawan; · PPh yang dipungut Badan Pemungut Lainnya; · Surat Tagihan Pajak (STP); · SKPKB; · SKPKB PPh Penebusan Migas; · SKPKB PPh Penyerahan Rokok Produksi Dalam Negeri;

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
411123	<ul style="list-style-type: none"> · SKPKBT; · SKPKBT PPh Penebusan Migas; dan · SKPKBT PPh Penyerahan Rokok Produksi Dalam Negeri.
	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran: <ul style="list-style-type: none"> · Masa; · Surat Tagihan Pajak (STP); · SKPKB; · SKPKBT.
411124	Pendapatan PPh Pasal 23 Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran: <ul style="list-style-type: none"> · Masa; · Dividen; · Bunga; · Royalti; · Jasa; · PPh Bunga Simpanan Anggota Koperasi; · Surat Tagihan Pajak (STP); · STP Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa; · SKPKB; · SKPKB Dividen, Bunga Royalti dan Jasa; · SKPKB PPh Bunga Simpanan Anggota Koperasi; · SKPKBT; · SKPKBT Dividen, Bunga, Royalti dan Jasa; dan · SKPKBT PPh Bunga Simpanan Anggota Koperasi.
	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 29 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran: <ul style="list-style-type: none"> · Masa/Angsuran; · Tahunan; · Surat Tagihan Pajak (STP); · SKPKB; dan · SKPKBT.
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 29 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran: <ul style="list-style-type: none"> · Masa/Angsuran · Tahunan; · Surat Tagihan Pajak (STP); · SKPKB; dan · SKPKBT.
	Pendapatan PPh Pasal 26 Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran: <ul style="list-style-type: none"> · Masa/Angsuran; · Dividen;

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
	<ul style="list-style-type: none"> · Bunga; · Royalti; · Jasa; · Laba setelah pajak BUT; · Surat Tagihan Pajak (STP); · STP Dividen, Bunga, Royalti, Jasa dan Laba setelah pajak BUT; · SKPKB; · SKPKB Dividen, Bunga Royalti, Jasa dan Laba setelah pajak BUT; · SKPKBT; dan · SKPKBT Dividen, Bunga, Royalti, Jasa dan Laba setelah pajak BUT.
411128	<p>Pendapatan PPh Final</p> <p>Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 29 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Fiskal Luar Negeri; · PPh Final Pasal 4 ayat (2) Diskonto/Bunga Obligasi Orang Pribadi; · PPh Final Pasal 4 ayat (2) Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan OP; · PPh Final Pasal 4 ayat (2) Persewaan Tanah dan/atau Bangunan Orang Pribadi; · PPh Final Pasal 4 ayat (2) Bunga Deposito/Tabungan dan SBI Orang Pribadi; · PPh Final Pasal 4 ayat (2) Hadiah Undian Orang Pribadi; · PPh Final Pasal 4 ayat (2) Transaksi saham dan obligasi di Burse Efek Orang Pribadi; · PPh Final Pasal 4 ayat (2) Penjualan Saham Pendiri Orang Pribadi; · PPh Final Pasal 4 ayat (2) Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura OP; · PPh Final Pasal 4 ayat (2) Jasa Konstruksi Orang Pribadi; · PPh Final Pasal 15 Jasa Pelayaran Dalam Negeri Orang Pribadi; · PPh Final Pasal 15 Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri Orang Pribadi; · PPh Final Pasal 15 Jasa Penerbangan Dalam Negeri Orang Pribadi; · PPh Final Pasal 15 Penghasilan Perwakilan Dagang LN Orang Pribadi; · PPh Final Pasal 15 Pola Bagi Hasil Orang Pribadi; · PPh Final Pasal 15 Kerjasama Bentuk BOT Orang Pribadi; · PPh Final Pasal 4 ayat (2) Diskonto/Bunga Obligasi Badan; · PPh Final Pasal 4 ayat (2) Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Badan; · PPh Final Pasal 4 ayat (2) Persewaan Tanah dan/atau Bangunan Badan; · PPh Final Pasal 4 ayat (2) Bunga Deposito/Tabungan dan SBI Badan; · PPh Final Pasal 4 ayat (2) Hadiah Undian Badan; · PPh Final Pasal 4 ayat (2) Transaksi saham dan obligasi di Burse Efek Badan; · PPh Final Pasal 4 ayat (2) Penjualan Saham Pendiri Badan; · PPh Final Pasal 4 ayat (2) Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura Badan; · PPh Final Pasal 4 ayat (2) Jasa Konstruksi Badan; · PPh Final Pasal 4 ayat (2) Jasa Konsultasi Badan; · PPh Final Pasal 15 Jasa Pelayaran Dalam Negeri Badan; · PPh Final Pasal 15 Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri Badan; · PPh Final Pasal 15 Jasa Penerbangan Dalam Negeri Badan; · PPh Final Pasal 15 Penghasilan Perwakilan Dagang LN Badan; · PPh Final Pasal 15 Pola Bagi Hasil Badan; · PPh Final Pasal 15 Kerjasama Bentuk BOT Badan; · PPh Final Pasal 19 Revaluasi Aktiva Tetap Badan; · PPh Final Lainnya; · Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Final; · SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2) Orang Pribadi;

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
	<ul style="list-style-type: none"> . SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2) Badan; . SKPKB PPh Final Pasal 15 Orang Pribadi; . SKPKB PPh Final Pasal 15 Badan; . SKPKB PPh Final Pasal 19 Badan; . SKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat (2) Orang Pribadi; . SKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat (2) Badan; . SKPKBT PPh Final Pasal 15 Orang Pribadi; . SKPKBT PPh Final Pasal 15 Badan; . SKPKBT PPh Final Pasal 19 Badan.
411129	<p>Pendapatan PPh Non Migas Lainnya</p> <p>Penerimaan yang berasal dari PPh, selain yang dihasilkan dari kegiatan penambangan minyak bumi, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Setoran PPh Lainnya dari Minyak Bumi; . Surat Tagihan Pajak (STP) Lainnya dari Minyak Bumi; . SKPKB PPh Lainnya dari Minyak Bumi dan; . SKPKBT PPh Lainnya dari Minyak Bumi. <p>Penerimaan yang berasal dari PPh, selain yang dihasilkan dari kegiatan penambangan Gas Alam, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Setoran PPh Lainnya dari Gas Alam; . Surat Tagihan Pajak (STP) Lainnya dari Gas Alam; . SKPKB PPh Lainnya dari Gas Alam; dan . SKPKBT PPh Lainnya dari Gas Alam.
41113	Pendapatan PPh Fiskal
411131	<p>Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri</p> <p>Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 29 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran Fiskal Luar Negeri.</p>
41114	Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah
411141	<p>Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah</p> <p>Cukup jelas.</p>
411142	<p>Pendapatan PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah</p> <p>Cukup jelas.</p>
411143	<p>Pendapatan PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah</p> <p>Cukup jelas.</p>
411144	<p>Pendapatan PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah</p> <p>Cukup jelas.</p>
411145	<p>Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Ditanggung Pemerintah</p> <p>Cukup jelas.</p>
411146	<p>Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah</p> <p>Cukup jelas.</p>
411147	<p>Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah</p> <p>Cukup jelas.</p>
411148	<p>Pendapatan PPh Final Ditanggung Pemerintah</p> <p>Cukup jelas.</p>
411149	<p>Pendapatan PPh Non Migas Lainnya Ditanggung Pemerintah</p> <p>Cukup jelas.</p>
4112	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
41121	Pendapatan PPN
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri
	<p>Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 18 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Setoran Masa; · Setoran Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar Daerah Pabean; · Setoran Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean; · Setoran Kegiatan Membangun Sendiri; · Setoran Penyerahan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan; · STP; · SKPKB Masa; · SKPKB Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean; · SKPKB Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean; · SKPKB Kegiatan Membangun Sendiri; · SKPKB Pemungut PPN; · SKPKBT Masa; · SKPKBT Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean; · SKPKBT Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean; · SKPKBT Kegiatan Membangun Sendiri; · SKPKBT Pemungut PPN; · PPN Final Membangun Sendiri; · Pemungut.
411212	Pendapatan PPN Impor
	<p>Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 18 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Setoran Masa; · STP; · SKPKB PPN Impor; · SKPKBT PPN Impor; · Pemungut.
411219	Pendapatan PPN Lainnya
	Penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PPN, yang belum tertampung dalam pembagian jenis penerimaan PPN.
41122	Pendapatan PPnBM
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri
	<p>Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 18 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Setoran Masa/Angsuran; · STP; · SKPKB Masa; · SKPKB Pemungut PPn BM; · SKPKBT Masa; · SKPKBT Pemungut PPnBM; · Pemungut.
411222	Pendapatan PPnBM Impor
	<p>Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 18 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Setoran Masa;

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
	<ul style="list-style-type: none"> · STP; · SKPKB PPn BM Impor; · SKPKBT PPn BM Impor; · Pemungut.
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya
	Penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PPnBM, yang belum tertampung dalam pembagian jenis penerimaan PPnBM.
4113	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
41131	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
411311	Pendapatan PBB Pedesaan
	Penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PBB sektor pedesaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1983.
411312	Pendapatan PBB Perkotaan
	Penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PBB sektor perkotaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1983.
411313	Pendapatan PBB Perkebunan
	Penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PBB sektor perkebunan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1983.
411314	Pendapatan PBB Kehutanan
	Penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PBB sektor kehutanan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1983.
411315	Pendapatan PBB Pertambangan
	Penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PBB sektor pertambangan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1983.
411316	Pendapatan PBB Migas
	Pendapatan yang diperoleh dari penarikan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam. Mulai digunakan untuk tahun 2009.
4114	Pendapatan BPHTB
41141	Pendapatan BPHTB
411411	Pendapatan BPHTB
	Penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran BPHTB yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 21 Tahun 1997 UU No. 20 tahun 2000.
4115	Pendapatan Cukai
41151	Pendapatan Cukai
411511	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau
	Penerimaan yang berasal dari cukai hasil tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak menggunakan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya pasal 4 ayat (1) c UU No. 11 Tahun 1995.
411512	Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol
	Penerimaan yang berasal dari cukai Ethyl Alkohol atau etanol meliputi barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C ₂ H ₅ OH yang diperoleh baik secara peragian dan/ atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.
411513	Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol
	Penerimaan yang berasal dari cukai MMEA adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman mengandung ethyl alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya dengan tidak menggunakan bahan antara lain : bir, shandy, anggur, gin, whisky (pasal 4 a).

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
411514	Pendapatan Denda Administrasi Cukai
	Penerimaan Denda Administrasi pada Direktorat Bea dan Cukai yang selama ini masih tergabung dalam MA Pabean Lainnya.
411519	Pendapatan Cukai Lainnya
	Pendapatan cukai lainnya adalah penerimaan dari cukai yang tidak tertampung pada Cukai Hasil Tembakau, Ethyl alcohol, Minuman Ethyl Alkohol dan Denda Administrasi Cukai (pasal 7 ayat (7) UU No. 11 tahun 1995).
4116	Pendapatan Pajak Lainnya
41161	Pendapatan Pajak Lainnya
411611	Pendapatan Bea Meterai
	Penerimaan yang berasal dari penggunaan Bea Meterai yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 1985.
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Meterai
	Penerimaan dana hasil Penjualan Benda Meterai oleh PT. Pos Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Keuangan (BA.015).
411613	Pendapatan PPn Batubara
	Digunakan untuk mencatat Pajak Penjualan (PPn) yang dilakukan oleh Wajib Pajak terkait dengan Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Pajak Penjualan bagi Kontraktor PKP2B Generasi I.
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya
	Penerimaan yang berasal dari pembayaran pajak tidak langsung lainnya yang tidak termasuk dalam ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 18 Tahun 2000.
41162	Pendapatan Bunga Penagihan Pajak
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh
	Penerimaan yang berasal dari pembayaran bunga dan denda penagihan surat ketetapan pajak PPh yang diatur berdasarkan UU No. 19 Tahun 1997 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 19 Tahun 2000.
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN
	Penerimaan yang berasal dari pembayaran bunga dan denda penagihan surat ketetapan pajak PPN yang diatur berdasarkan UU No. 19 Thn 1997 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 19 Thn 2000.
411623	Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM
	Penerimaan yang berasal dari pembayaran bunga dan denda penagihan surat ketetapan pajak PPnBM yang diatur berdasarkan UU No. 19 Thn 1997 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 19 Thn 2000.
411624	Pendapatan Bunga Penagihan PTLL
	Penerimaan yang berasal dari pembayaran bunga dan denda penagihan surat ketetapan pajak PTLL yang diatur berdasarkan UU No. 19 Thn 1997 yang telah dirubah terakhir dalam UU No. 19 Thn 2000.
41163	Pendapatan Pajak Lainnya Ditanggung Pemerintah
411631	Pendapatan Bunga Penagihan PPh Ditanggung Pemerintah
	Cukup jelas.
412	PENDAPATAN PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
4121	Pendapatan Bea Masuk
41211	Pendapatan Bea Masuk
412111	Pendapatan Bea Masuk
	Pendapatan yang berasal dari pungutan bea atas barang-barang impor.
412112	Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)
	Dasar UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabean Pasal 25/26.
412113	Pendapatan Denda Administrasi Pabean

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
	Penerimaan Denda Administrasi pada Direktorat Bea dan Cukai yang selama ini masih tergabung dalam MA Pabean Lainnya.
412114	Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
	Pendapatan bea masuk atas barang impor yang dibayar oleh perusahaan pengguna fasilitas KITE dengan mendapatkan fasilitas pengembalian Bea masuk.
412115	Denda Atas Sanksi Administrasi Dari Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang Tertentu Yang Pengangkutannya Di Dalam Daerah Pabean (Antar Pulau)
	Dalam rangka pelaksanaan undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabean, Ditjen Bea dan cukai diberi kewenangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap barang tertentu yang pengangkutannya di dalam daerah pabean (antar pulau).Denda ini berasal dari penerapan peraturan pasal 4,7,8 dan 9 UU No 17 tahun 2006.
412116	Pendapatan BM-DTP
	Untuk mencatat pendapatan bea masuk yang ditanggung pemerintah dan pada saat bersamaan dibayarkan Belanja Subsidi BM-DTP.
412119	Pendapatan Pabean Lainnya
	Pendapatan pabean lainnya adalah penerimaan yang berasal dari : · Sanksi administrasi berupa denda (pasal 37 ayat (1) UU No. 10 tahun 1995); · Bunga (pasal 38 ayat (1) UU No. 10 tahun 1995).
4122	Pendapatan Bea Keluar
41221	Pendapatan Bea Keluar
412211	Pendapatan Bea Keluar
	Pendapatan yang diperoleh dari pungutan atas barang-barang yang diekspor (dahulu disebut pajak ekspor).
412212	Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar
	Pendapatan yang diperoleh dari Denda Administrasi atas Bea keluar yang tidak dibayar/terlambat dibayar.
412213	Pendapatan Bunga Bea Keluar
	Pendapatan yang diperoleh dari beban Bunga atas Bea keluar yang tidak dibayar/terlambat dibayar.
42	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
421	PENERIMAAN SUMBER DAYA ALAM
4211	Pendapatan Minyak bumi
42111	Pendapatan Minyak Bumi
421111	Pendapatan Minyak Bumi
	Penerimaan bagian Pemerintah dari penjualan minyak bumi, masuk ke Bagian Anggaran 999.99 (Kementerian Keuangan - BUN).
4212	Pendapatan Gas Bumi
42121	Pendapatan Gas Bumi
421211	Pendapatan Gas Bumi
	Penerimaan bagian Pemerintah dari penjualan gas bumi, masuk ke Bagian Anggaran 999.99 (Kementerian Keuangan - BUN).
4213	Pendapatan Pertambangan Umum
42131	Pendapatan Pertambangan Umum
421311	Pendapatan Iuran Tetap
	Dipungut dari Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan umum (Kontrak Karya, Kuasa Pertambangan dan Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara). Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421312	Pendapatan Royalti
	Dipungut dari Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan umum (Kontrak Karya, Kuasa Pertambangan

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
	dan Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan). Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
4214	Pendapatan Kehutanan
42141	Pendapatan Dana Reboisasi
421411	Pendapatan Dana Reboisasi
	Dipungut dari perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Ijin Penebangan Kayu (IPK) dan Pemenang Lelang Kayu Sitaan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kehutanan (BA 029).
42142	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan
421421	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan
	Dipungut dari perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Ijin Penebangan Kayu (IPK) dan Pemenang Lelang Kayu Sitaan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kehutanan (BA 029).
42143	Pendapatan IIUPH (IHPH)
421431	Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Industri
	Dipungut dari perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan pemegang izin usaha pengelolaan hutan (IUPH/HPH). Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kehutanan (BA 029).
421432	Pendapatan IIUPH (IHPH) Bambu
	Dipungut dari perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan pemegang izin usaha pengelolaan hutan (IUPH/HPH) Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kehutanan (BA 029).
421433	Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Rotan
	Dipungut dari perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan pemegang izin usaha pengelolaan hutan (IUPH/HPH). Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kehutanan (BA 029).
421434	Pendapatan IIUPH (IHPH) Hutan Alam
	Dipungut dari perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan pemegang izin usaha pengelolaan hutan (IUPH/HPH). Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kehutanan (BA 029).
42144	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan
421441	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan
	PNBP yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang luas kewasannya hutannya di atas 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau.
4215	Pendapatan Perikanan
42151	Pendapatan Perikanan
421511	Pendapatan Perikanan
	Penerimaan dari Pungutan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan dari Perusahaan Perikanan dalam rangka PMA/PMDN. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (BA 032).
4216	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi
42161	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi
421611	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi
	Penerimaan bersih dari setoran bagian pemerintah yang berasal dari pengusaha panas bumi sesuai dengan Keppres No.49 Tahun 1991, masuk Bagian Anggaran 999.99 (Kementerian Keuangan - BUN).
422	PENDAPATAN BAGIAN LABA BUMN
4221	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN
42211	Pendapatan Laba BUMN Perbankan
422111	Pendapatan Laba BUMN Perbankan
	Penerimaan bagian pemerintah dari laba BUMN perbankan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Keuangan -

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
	BUN (BA 999.03).
42212	Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan
422121	Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan
	Penerimaan bagian pemerintah dari laba BUMN non perbankan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Keuangan - BUN (BA 999.03).
423	PENDAPATAN PNBP LAINNYA
4231	Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan
42311	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan
423111	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan
	Penerimaan dari penjualan sisa penelitian pertanian, benih dan hasil pertanian dari praktek perkebunan siswa. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Pertanian (BA 018).
423112	Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan
	Penerimaan dari penjualan sisa penelitian peternakan dan perikanan, semen beku untuk inseminasi buatan, bibit ternak, calon bibit, ternak susu, ternak afkir, hasil peternakan dan perikanan praktek siswa. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Pertanian (BA 018), Kementerian Kelautan dan Perikanan (BA 032).
423113	Pendapatan Penjualan Hasil Tambang
	Penerimaan dari penjualan produksi batubara bagian pemerintah di luar royalti dan PPN. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
423114	Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan
	Penerimaan dari penjualan hasil sitaan baik berupa uang maupun hasil penjualan barang rampasan. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan Agung (BA 006), Kementerian Hukum dan HAM, dan Kepolisian RI.
423115	Pendapatan Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi Lainnya
	Penjualan vaksin dan antigen hewan ternak pada Kementerian Pertanian (BA 018) termasuk di dalamnya Penjualan radioisotop pada BATAN (BA 042.03).
423116	Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya
	Penjualan Informasi, Penerbitan, Film dan Hasil Cetakan lain yang berada di berbagai Kementerian seperti Kementerian Pertanian (BA 018), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020), Kementerian Perhubungan (BA 022), Kementerian Kesehatan (BA 024), Kementerian Pekerjaan Umum (BA 033), Kementerian Negara Ristek (BA 042), Kementerian Negara PAN & RB (BA 048), dan BIN (BA 050), Kementerian Negara Kominfo (BA 059).
423117	Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan
	Penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian yang berasal dari penjualan dokumen lelang.
423118	Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni.
	Penerimaan yang berasal dari penjualan Cadangan Beras pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni oleh Perum BULOG.
423119	Pendapatan Penjualan Lainnya
	Penjualan yang tidak termasuk penjualan-penjualan di atas.
42312	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN
423121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan, tidak termasuk penjualan sewa beli rumah dinas, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
423122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
423123	Pendapatan Penjualan Sewa Beli

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
423124	Digunakan untuk mencatat pendapatan penjualan sewa beli, termasuk penerimaan dari penjualan rumah dinas melalui kontrak sewa beli. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (BA 033).
	Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing/Cina
423125	Digunakan untuk mencatat pendapatan penjualan aset bekas milik Asing/Cina, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
	Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan
423126	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari tukar menukar Tanah, Gedung dan Bangunan, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
	Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin
423127	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari tukar menukar Peralatan dan Mesin, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
	Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan
423129	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari tukar menukar jalan, irigasi dan jaringan, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
423131	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
	Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas
423132	Pendapatan Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak
	Penerimaan yang timbul akibat selisih harga beli BBM Pemerintah dari Badan Usaha (harga patokan) lebih rendah/kecil dari harga jual BBM Pemerintah kepada Masyarakat yang ditetapkan dalam Perpres. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Keuangan - BUN.
423139	Pendapatan Minyak Mentah (DMO)
	Penerimaan yang berasal dari selisih antara nilai minyak mentah DMO / Domestic Market Obligation dengan harga ICP / Indonesian Crude Price dengan DMO Fee. Nilai minyak mentah DMO adalah hasil penjualan minyak mentah bagian KKKS (Kontraktor Kontrak kerja Sama) diserahkan kepada Pemerintah atau dibeli Pemerintah. Sedangkan DMO Fee adalah pembayaran atau harga beli Pemerintah atas penyerahan minyak mentah DMO bagian KKKS. Penerimaan ini bersifat kontijensi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Keuangan - BUN.
423141	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas
	Penerimaan yang diterima dari kegiatan usaha hulu migas seperti penerimaan bonus dari KKKS.
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	
423142	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
	Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian, termasuk pendapatan sewa rumah dinas.
423143	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat pendapatan sewa Peralatan dan Mesin, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
423144	Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
423145	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
423145	Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin, merupakan penerimaan umum yang

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
	(bisa) ada di semua Kementerian.
423146	Pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi dan Jaringan Digunakan untuk mencatat pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi dan Jaringan, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
423147	Pendapatan dari Bangun, Guna, Serah (BGS) Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Bangun, Guna, Serah (BGS).
423148	Pendapatan dari Bangun, Serah, Guna (BSG) Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Bangun, Serah, Guna (BSG).
423149	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemanfaatan BMN Lainnya, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
4232	Pendapatan Jasa
42321	Pendapatan Jasa I
423211	Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya Pendapatan dari hasil pelayanan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan, baik yang berada di Lingkungan Kementerian Kesehatan maupun kementerian lainnya.
423212	Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA) Pendapatan dari penjualan karcis masuk tempat hiburan/taman maupun museum yang berada di lingkungan Kementerian Kehutanan (BA 029) maupun Kementerian Pendidikan Nasional (BA 023) dan LIPI/Kem Neg Ristek (BA 042).
423213	Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor Pendapatan dari pelayanan pembuatan Surat Keterangan, antara lain Visa dan paspor oleh Kementerian Luar Negeri (BA 011), pendapatan dari surat keterangan keimigrasian antara lain KITAS, izin tinggal tetap di Indonesia dari Kementerian Hukum dan HAM (BA 013), Surat Keterangan Asal (SKA) dari Kementerian Perdagangan (BA 090).
423214	Pendapatan Hak dan Perijinan Pendapatan dari permintaan hak paten, hak cipta maupun perpanjangan Merk di Kementerian Hukum dan HAM (BA 013), Pendapatan dari pendaftaran pestisida, royalti hasil penelitian dan pembuatan label obat-obatan pertanian/peternakan di Kementerian Pertanian (BA 018), wajib daftar perusahaan, pengujian mutu barang dan sertifikasi mutu barang di Kementerian Perindustrian (BA 019) dan/atau Kementerian Perdagangan (BA 090), biaya hak penggunaan frekuensi radio, biaya ijin amatir radio di Kementerian Perhubungan (BA 022), hak dan perijinan Kementerian Tenaga Kerja (BA 026), hak dan perijinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (BA 032), termasuk hasil lelang 3G (postel).
423215	Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan Pendapatan Sensor/Karantina, pengawasan, pemeriksaan di berbagai kementerian antara lain Kementerian Pertanian (BA 018), Kementerian Perindustrian (BA 019) , Kementerian Perdagangan (BA 090), Kementerian Pendidikan Nasional (BA 023), Kementerian Kesehatan (BA 024), Kementerian Kelautan dan Perikanan (BA 032), Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (BA 040).
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Dan Pendapatan DJBC Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan dan teknologi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian dan pendapatan BC.
423217	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama Pendapatan dari hasil pelayanan jasa urusan agama terutama pencatatan nikah dan rujuk di lingkungan Kementerian Agama (BA 025).
423218	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan, dan Kenavigasian

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
	Penerimaan dari jasa penyeberangan untuk kapal lintas dalam negeri dan luar negeri, pendapatan pengguna sarana bantu navigasi dan pendapatan jasa perkapalan, pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara, pelayanan jasa penerbangan, sewa dan tanda masuk Bandar Udara. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (BA 032).
423219	Pendapatan Pelayanan Pertanahan
	Digunakan untuk membukukan penerimaan pelayanan survei, pengukuran, dan pemetaan; penerimaan pelayanan pemeriksaan tanah; penerimaan pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya; penerimaan pelayanan pertimbangan teknis pertanahan; penerimaan pelayanan pendaftaran tanah; penerimaan pelayanan informasi pertanahan; penerimaan pelayanan lisensi; penerimaan pelayanan penetapan obyek tanah penguasaan benda-benda tetap milik perseorangan warga negara Belanda (P3MB)/Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965; penerimaan pelayanan di bidang pertanahan yang berasal dari kerjasama dengan pihak lain. Merupakan penerimaan fungsional BPN (BA. 056) sesuai dengan PP No. 13 Tahun 2010. Berlaku sejak Januari 2011.
42322	Pendapatan Jasa II
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
	Pendapatan yang berasal dari bunga rekening giro pemerintah.
423222	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi
	Penerimaan dari pungutan operator telekomunikasi yang memperoleh ijin resmi telekomunikasi dan penerimaan jasa telekomunikasi pelabuhan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).
423223	Pendapatan Iuran Lelang untuk Fakir Miskin
	Pendapatan yang berasal dari sebagian hasil lelang penghapusan BMN yang dialokasikan untuk Fakir Miskin dan berasal dari seluruh Kementerian Negara/Lembaga serta disetorkan atas nama Kementerian Sosial (BA 027).
423224	Pendapatan Jasa Catatan Sipil
	Penerimaan dari hasil pelayanan jasa Kantor Catatan Sipil. Masuk pendapatan Kementerian Dalam Negeri (BA 010).
423225	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa
	Pendapatan yang berasal dari pengenaan biaya penagihan secara paksa atas piutang pajak tidak tertagih. Masuk pendapatan Kementerian Keuangan (BA 015).
423226	Pendapatan Uang Pewarganegaraan
	Pendapatan yang berasal dari uang registrasi menjadi warga Negara Indonesia, masuk pendapatan Kementerian Hukum dan HAM (BA 013).
423227	Pendapatan Bea Lelang
	Pendapatan yang diperoleh dari bea lelang dan masuk pendapatan Kementerian Keuangan (BA 015).
423228	Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara
	Pendapatan yang berasal dari Jasa Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara. Masuk pendapatan Kementerian Keuangan (BA 015).
423229	Pendapatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi
	Merupakan penerimaan yang berasal dari Registrasi Dokter dan Dokter Gigi yang diselenggarakan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
42323	Pendapatan Jasa Luar Negeri
423231	Pendapatan dari Pemberian Surat Perjalanan RI
	Pendapatan dari surat perjalanan RI dan masuk ke Bagian Anggaran Kementerian Luar Negeri (BA 011).
423232	Pendapatan dari Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler
	Pendapatan dari pengurusan dokumen konsuler dan masuk ke Bagian Anggaran Kementerian Luar Negeri (BA 011).

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
423239	Pendapatan Rutin Lainnya dari Luar Negeri Pendapatan dari luar negeri selain surat perjalanan RI dan pengurusan dokumen konsuler.
42324	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan
423241	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan Pendapatan layanan jasa perbankan.
42325	Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara
423251	Pendapatan atas Penertiban SP2D Dalam Rangka TSA Pendapatan yang diterima dari Bank Operasional atas penerbitan SP2D dalam rangka pengelolaan TSA (Pendapatan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan).
423252	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum Pendapatan yang diterima dari hasil penempatan uang negara pada Bank Umum (Pendapatan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan).
423253	Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional Pooling Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury National Pooling. (Pendapatan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan).
423254	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia Pendapatan yang diterima dari hasil penempatan uang negara pada Bank Sentral (Pendapatan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan).
42326	Pendapatan Jasa Kepolisian I
423261	Pendapatan Surat Izin Mengemudi (SIM) Digunakan untuk mencatat PNBPN POLRI yang diterima dari pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM).
423262	Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Digunakan untuk mencatat PNBPN POLRI yang diterima dari pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
423263	Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) Digunakan untuk mencatat PNBPN POLRI yang diterima dari pengurusan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK).
423264	Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Digunakan untuk mencatat PNBPN POLRI yang diterima dari pengurusan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
423265	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Digunakan untuk mencatat PNBPN POLRI yang diterima dari pengurusan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).
423266	Pendapatan Ujian Ketrampilan Mengemudi Melalui Simulator Digunakan untuk mencatat PNBPN POLRI yang diterima dari Ujian Ketrampilan Mengemudi Melalui Simulator.
423267	Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak Digunakan untuk mencatat PNBPN POLRI yang diterima dari Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak.
42327	Pendapatan Jasa Pelayanan Jalan Tol
423271	Pendapatan Jasa Pelayanan Jalan Tol Suramadu Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengelolaan Jembatan Suramadu. merupakan pendapatan Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga (BA 033.04).
42328	Pendapatan Jasa Kepolisian II
423281	Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah Digunakan untuk mencatat PNBPN POLRI yang diterima dari Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
	Daerah.
423282	Pendapatan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Digunakan untuk mencatat PNBP POLRI yang diterima dari Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
423283	Pendapatan Penerbitan Surat Keterangan Laporan Diri Digunakan untuk mencatat PNBP POLRI yang diterima dari Penerbitan Surat Keterangan Laporan Diri.
423284	Pendapatan Penerbitan Kartu Sidik Jari (Inafis Card) Digunakan untuk mencatat PNBP POLRI yang diterima dari Penerbitan Kartu Sidik Jari (Inafis Card).
423285	Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas Digunakan untuk mencatat PNBP POLRI yang diterima dari Denda Pelanggaran Lalu Lintas.
42329	Pendapatan Jasa Lainnya
423291	Pendapatan Jasa Lainnya Pendapatan jasa yang tidak termasuk kelompok pendapatan jasa I dan II.
4233	Pendapatan Bunga
42331	Pendapatan Bunga
423311	Pendapatan Bunga atas Investasi dalam Obligasi Pendapatan bunga yang bersumber dari investasi atau pembelian surat-surat berharga berupa obligasi.
423312	Pendapatan PPA (eks BPPN) atas Bunga Obligasi Pendapatan bunga dari BPPN yang bersumber dari investasi / pembelian surat-surat berharga berupa obligasi.
423313	Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman Pendapatan yang berasal dari bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya yang timbul dari pemberian piutang tersebut di atas.
423314	Pendapatan Bunga dari Pemberian Kredit Pemerintah Pendapatan yang berasal dari bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya yang berasal dari pemberian kredit pemerintah termasuk kredit investasi pemerintah dan kredit bidang perkebunan dan kehutanan.
423315	Pendapatan Bunga dari Rekening Pembangunan Hutan Pendapatan yang berasal dari bunga, yang berasal dari pengelolaan rekening pembangunan hutan sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi.
423319	Pendapatan Bunga Lainnya Pendapatan bunga selain yang bersumber dari investasi atau pembelian surat-surat berharga lainnya.
42332	Pendapatan Gain on Bond Redemption
423321	Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang Pendapatan yang diperoleh dari selisih lebih carrying value Obligasi yang dibeli kembali dengan clean price yang dibayar Pemerintah pada saat pembelian kembali Obligasi (buyback). Carrying Value Obligasi ialah nominal Obligasi setelah dikurangi atau ditambah unamortized discount atau premium.
423322	Pendapatan dari Transaksi Security Lending Cukup jelas.
42333	Pendapatan Premium atas Obligasi Negara
423331	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah Pendapatan yang diperoleh pada saat penerbitan SUN berdenominasi Rupiah yang dihitung dari selisih lebih penerimaan kas (clean price) dengan nominal SUN yang diterbitkan.
423332	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing Pendapatan yang diperoleh pada saat penerbitan SUN berdenominasi Valuta Asing yang dihitung dari selisih lebih penerimaan kas (clean price) dengan nominal SUN yang diterbitkan.
423333	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Negeri/Rupiah Pendapatan yang diperoleh pada saat penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berdenominasi

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
	Rupiah yang dihitung dari selisih lebih penerimaan kas (clean price) dengan nominal SBSN.
423334	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Valuta Asing
	Pendapatan yang diperoleh pada saat penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berdenominasi Valuta Asing yang dihitung dari selisih lebih penerimaan kas (clean price) dengan nominal SBSN.
42334	Pendapatan Fee Lainnya atas Transaksi Surat Berharga Negara
423341	Pendapatan atas Transaksi Security Lending SUN
	Untuk mencatat pendapatan atas SUN yang dipinjamkan kepada Dealer Utama. Menjadi pendapatan Bagian Anggaran 999.01 (Sistem Akuntansi Utang Pemerintah).
4234	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi
42341	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi
423411	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan
	Penerimaan legalisasi tanda tangan. Masuk ke Bagian Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (BA 013).
423412	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan
	Pengesahan surat di bawah tangan. Masuk ke Bagian Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (BA 013).
423413	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)
	Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung (BA 005).
423414	Pendapatan Hasil Denda dan sebagainya
	Hasil denda di lingkungan Kejaksaan Agung (BA 006).
423415	Pendapatan Ongkos Perkara
	Pendapatan dari ongkos perkara di lingkungan Kejaksaan Agung (BA 006).
423416	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi
	Pendapatan negara yang berasal dari lelang barang-barang tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi (TIPIKOR).
423417	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi
	Pendapatan negara yang berasal dari lelang barang-barang Gratifikasi yang diserahkan oleh penyelenggara negara.
423419	Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya
	Menampung pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya.
4235	Pendapatan Pendidikan
42351	Pendapatan Pendidikan
423511	Pendapatan Uang Pendidikan
	Uang pendidikan berasal dari Sekolah maupun PTN yang menyelenggarakan pendidikan baik di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional maupun di kementerian lain.
423512	Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan
	Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat dan Akhir pendidikan yang berasal dari Sekolah maupun PTN yang menyelenggarakan pendidikan baik di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (BA 023) maupun di kementerian lain.
423513	Pendapatan Uang Ujian untuk Menjalankan Praktek
	Uang Ujian untuk menjalankan Praktek yang berasal dari Sekolah Maupun PTN yang menyelenggarakan pendidikan baik di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (BA 023) maupun di kementerian lain.
423519	Pendapatan Pendidikan Lainnya
	Uang pendapatan pendidikan lainnya seperti sumbangan pendidikan yg berasal dari Sekolah Maupun PTN yg menyelenggarakan pendidikan baik di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (BA 023) maupun di kementerian lain.
4236	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
42361	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi
423611	Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Ditetapkan Pengadilan PNBP yang merupakan uang sitaan dari hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan.
423612	Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara.
423613	Pendapatan dari Pengembalian Penyalahgunaan Penyelenggaraan Keuangan Pendapatan dari pengembalian penyalahgunaan penyelenggaraan keuangan.
423614	Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Yang Ditetapkan Di Pengadilan Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan pengadilan.
423615	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara Pendapatan dari pengembalian uang Negara berdasarkan putusan pengadilan.
4237	Pendapatan Iuran dan Denda
42371	Pendapatan Iuran Badan Usaha
423711	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM PNBP yang berasal dari Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM.
423712	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa PNBP yang berasal dari Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.
423713	Iuran Badan Usaha di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan PNBP yang berasal dari Iuran Badan Usaha dari kegiatan di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
42372	Pendapatan Dana Pengamanan Hutan
423721	Pendapatan Dana Pengamanan Hutan Pendapatan yang diterima dari Dana Pengamanan Hutan (DPH), Dana Illegal Logging, Dana Kompensasi Areal Pengganti.
42373	Pendapatan dari Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
423731	Pendapatan Iuran Menangkap/Mengambil/Mengangkut Satwa Liar/Mengambil/Mengangkut Tumbuhan Alam Hidup Pendapatan yang diterima dari iuran kepada pemegang izin menangkap, mengambil dan mengangkut satwa liar dan tumbuhan alam dalam keadaan hidup atau mati atau bagian-bagian daripadanya yang tidak dilindungi undang-undang dan yang dilindungi undang-undang.
423732	Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA) Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA) adalah pungutan yang dikenakan kepada calon pemegang izin pengusahaan pariwisata alam dan dikenakan sekali selama jangka waktu pengusahaan.
423733	Pungutan Izin Pengusahaan Taman Buru (PIPTB) Pungutan izin pengusahaan taman buru (PIPTB) adalah pungutan yang dikenakan kepada calon pemegang izin pengusahaan taman buru dan dikenakan sekali dalam jangka waktu pengusahaan.
423734	Pungutan Izin Berburu di Taman Buru dan Areal Buru (PIB) Pungutan Izin Berburu adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin berburu dan dikenakan satu kali pada saat izin berburu dikeluarkan.
423735	Pungutan Masuk Obyek Wisata Alam Pungutan masuk adalah pungutan yang dikenakan terhadap setiap pengunjung yang masuk ke Taman Wisata Alam, Taman Nasional dan atau Taman Buru.
423736	Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA) Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA) adalah iuran yang dikenakan kepada pemegang izin pengusahaan pariwisata alam yang dikenakan dari hasil usahanya sekali setiap tahun.
423737	Iuran Hasil Usaha Perburuan di Taman Buru (IHUPTB)

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
	Iuran Hasil usaha Perburuan di Taman Buru (IHUPB) adalah iuran yang dikenakan kepada pemegang izin berburu berdasarkan jumlah satwa yang diburu sesuai dengan harga patokan yang berlaku untuk masing-masing jenis satwa yang diburu.
423738	Pendapatan Penggantian Nilai Tegakan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan penggantian nilai tegakan dari Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan atau dari Penyiapan Lahan dalam Pembangunan Hutan Tanaman (Merupakan PNBK Kementerian Kehutanan - BA 029).
42374	Pendapatan Penerimaan dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan
423741	Pendapatan Penerimaan Dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan
	Penerimaan dana kompensasi pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) Kelautan yang berasal dari Kapal Keruk Pasir Laut. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (BA 032).
42375	Pendapatan Denda
423751	Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan
	Pendapatan yang diterima dari Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH), Penerimaan dari Denda post audit dan tata usaha Provisi Sumber Daya Hutan.
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
	PNBK yang berasal dari setoran rekanan pemerintah, berupa denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua kementerian.
423753	Pendapatan Denda Administrasi BPHTB
	Merupakan penerimaan dari Badan Pertanahan Nasional (BA 056).
423754	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal
	Pendapatan denda yang berasal dari pelaku pasar modal karena pelanggaran yang dilakukan. Merupakan PNBK Kementerian Keuangan.
423755	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha
	Pendapatan denda yang berasal dari pelaku usaha yang telah mendapatkan putusan tetap dari pengadilan. Merupakan PNBK Komisi Pengawas Persaingan Usaha (BA 108).
423756	Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA
	Cukup Jelas. Pendapatan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan (BA 015.05) selaku Kuasa BUN.
423757	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Penempatan uang Negara di Bank Umum dan Bank Indonesia
	Cukup jelas. Pendapatan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan (BA 015.05) selaku Kuasa BUN.
423758	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Treasury Notional Pooling
	Cukup jelas. Pendapatan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan (BA 015.05) selaku Kuasa BUN.
423759	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi
	Mencatat pendapatan denda yang berasal dari kekurangan/ keterlambatan pelimpahan penerimaan negara oleh Bank Persepsi.
42376	Pendapatan Denda II
423761	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Saldo BO II ke BO I
	Cukup jelas.
423762	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pembagian PBB oleh BO III PBB
	Cukup jelas.
4239	Pendapatan Lain-lain
42391	Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu
423911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL
	Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua kementerian.
423912	Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
	Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua kementerian.
423913	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL
	Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua kementerian.
423914	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinj. LN TAYL
	Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua kementerian.
423915	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah TAYL
	Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua kementerian.
423916	Penerimaan Kembali Belanja Swadana TAYL
	Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua kementerian.
423917	Penerimaan Kembali Transfer Ke Daerah TAYL
	Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari pengembalian transfer ke daerah Tahun Anggaran Yang Lalu. (BA 999.05).
42392	Pendapatan Pelunasan Piutang
423921	Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara
	Pendapatan yang berasal dari pembayaran cicilan Piutang Non Bendahara. Piutang non bendahara terjadi karena kelalaian pegawai yang menyebabkan kerugian negara di luar pengurusan keuangan negara.
423922	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara
	Pendapatan yang berasal dari pembayaran cicilan TP/TGR bendahara. TP/TGR Bendahara terjadi karena ada kerugian negara yang disebabkan kesalahan atau kelalaian bendahara dalam rangka pengurusan keuangan Negara. Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua kementerian.
42393	Pendapatan dari Penutupan Rekening
423931	Pendapatan dari Penutupan Rekening
	Cukup jelas.
42394	Pendapatan dari Selisih kurs
423941	Pendapatan dari Selisih Kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUN
	Digunakan untuk mencatat untung selisih kurs terealisasi dalam pengelolaan rekening milik BUN.
423942	Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI
	Digunakan untuk mencatat realisasi kentungan selisih kurs uang persediaan pada satker perwakilan RI di Luar Negeri dan Atase Teknis.
42399	Pendapatan Lain-lain
423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji
	PNBP yang berasal dari pengembalian Uang Muka Gaji Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua kementerian.
423992	Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional
	Merupakan PNBP yang berasal dari Pembayaran Premi dalam rangka Penjaminan Perbankan Nasional.
423993	Pendapatan dari Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHHL)
	Merupakan pendapatan yang berasal dari Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHHL).
423994	Pendapatan dari Biaya Pengawasan HET Minyak Tanah
	Pendapatan yang berasal dari Biaya Pengawasan HET Minyak Tanah. Merupakan PNBP Kementerian Dalam Negeri (BA 010).
423995	Pendapatan Bagian Pemerintah dari Sisa Surplus Bank Indonesia
	Pendapatan Bagian Pemerintah dari Sisa Surplus Bank Indonesia.
423996	Pendapatan Jasa Perbendaharaan
	Pendapatan yang diterima Pemerintah dari Bank Umum atau PT Pos sebagai pengelola kas negara (Bank Operasional).

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
423997	Pendapatan Kelebihan Pelimpahan Pajak/PNBP dari Bank/Pos Persepsi Cukup jelas.
423998	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak Merupakan pendapatan BA 015.06 (Ditjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan)
423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua kementerian.
424	PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum
42411	Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Pendapatan BLU dari hasil pelayanan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan, baik yang berada di Lingkungan Kementerian Kesehatan (BA 024) maupun kementerian lainnya.
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan Pendapatan BLU yang berasal dari Sekolah maupun PTN yang menyelenggarakan pendidikan baik di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (BA 023) maupun di kementerian lain.
424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan TeKnologi Pendapatan BLU dari kegiatan Jasa layanan bantuan tenaga trampil, informasi, pekerjaan, pelatihan dan teknologi.
424114	Pendapatan Jasa Pencetakan Pendapatan BLU dari jasa pencetakan dokumen, buku dan sejenisnya.
424115	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian Pendapatan BLU dari Jasa kegiatan Bandara, pelabuhan laut dan pengaturan navigasi untuk kepentingan transportasi.
424116	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi Pendapatan BLU atas kegiatan layanan penyelenggaraan kegiatan telekomunikasi melalui media atau sarana yang ada seperti alat telekomunikasi dan sejenisnya.
424117	Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran Pendapatan BLU atas jasa Layanan kegiatan pemasaran produk-produk tertentu yang ditujukan bagi konsumen atau pengguna produk atau jasa yang ditawarkan.
424118	Pendapatan Penyediaan Barang Pendapatan BLU yang diperoleh dari kegiatan penyediaan barang untuk kepentingan masyarakat atau instansi pengguna lainnya.
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Pendapatan BLU yang diperoleh dari kegiatan di luar penyediaan barang dan jasa lainnya.
42412	Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu
424121	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita Pendapatan BLU dari hasil pengelolaan Kawasan Otorita yang ditetapkan oleh Pemerintah.
424122	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pendapatan BLU dari hasil pengelolaan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang ditetapkan oleh Pemerintah.
424123	Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah Pendapatan BLU dari hasil pengelolaan Fasilitas Umum milik Pemerintah.
424129	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya Pendapatan BLU dari hasil diluar pengelolaan kawasan otorita, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan fasilitas umum lainnya.

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
42413	Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat
424131	Pendapatan Program Dana Penjaminan Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan program dana penjaminan.
424132	Pendapatan Program Dana Penjaminan Syariah Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan program dana penjaminan Syariah.
424133	Pendapatan Program Modal Ventura Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan program Modal Ventura.
424134	Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan program dana bergulir Sektoral.
424135	Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan program dana bergulir Syariah.
424136	Pendapatan Investasi Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan investasi atas bidang-bidang tertentu.
424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana khusus lainnya.
4242	Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum
42421	Pendapatan Hibah Terikat
424211	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan Pendapatan Hibah terikat Dalam Negeri yang berasal dari perorangan.
424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha Pendapatan Hibah terikat Dalam Negeri yang berasal dari Lembaga / Badan Usaha.
424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda Pendapatan Hibah terikat Dalam Negeri yang berasal dari Pemda.
424214	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Perorangan Pendapatan Hibah terikat Luar Negeri yang berasal dari perorangan.
424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha Pendapatan Hibah terikat Luar Negeri yang berasal dari Lembaga/Badan Usaha.
424216	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Negara Pendapatan Hibah terikat Luar Negeri yang berasal dari Negara.
424219	Pendapatan Hibah Terikat Lainnya Pendapatan Hibah terikat Dalam / Luar Negeri yang bukan berasal dari perorangan, lembaga/ Badan Usaha dan Pemda.
42422	Pendapatan Hibah Tidak Terikat
424221	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan Pendapatan Hibah Tidak terikat Dalam Negeri yang berasal dari perorangan.
424222	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha Pendapatan Hibah Tidak terikat Dalam Negeri yang berasal dari lembaga/Badan Usaha.
424223	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda Pendapatan Hibah Tidak terikat Dalam Negeri yang berasal dari pemda.
424224	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Perorangan Pendapatan Hibah Tidak terikat Luar Negeri yang berasal dari perorangan.
424225	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha Pendapatan Hibah Tidak terikat Luar Negeri yang berasal dari Lembaga/Badan Usaha.
424226	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Negara

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
	Pendapatan Hibah Tidak terikat Luar Negeri yang berasal dari Negara lain.
424229	Pendapatan Hibah Tidak Terikat -Lainnya
	Pendapatan Hibah Tidak terikat Dalam / Luar Negeri yang bukan berasal dari perorangan, lembaga/ Badan Usaha dan Pemda.
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU
42431	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan
	Pendapatan BLU yang diperoleh dari hasil kegiatan kerjasama dengan pihak lain : perorangan.
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha
	Pendapatan BLU yang diperoleh dari hasil kegiatan kerjasama dengan pihak lain : Lembaga/Badan Usaha.
424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah
	Pendapatan BLU yang diperoleh dari hasil kegiatan kerjasama dengan pihak lain : Pemda.
4249	Pendapatan BLU Lainnya
42491	Pendapatan BLU Lainnya
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
	Kode akun ini digunakan untuk mencatat pendapatan jasa giro dan layanan perbankan yang diterima oleh Badan Layanan Umum.
424912	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang dibatasi pengelolaannya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga dari penempatan endowment fund dan dana cadangan pendidikan oleh BLU bidang pendidikan atau yang ditunjuk pada Kementerian Keuangan.
43	PENERIMAAN HIBAH
431	PENDAPATAN HIBAH DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
4311	Pendapatan Hibah Dalam Negeri
43111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Terencana
431111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana Perorangan
	Penerimaan hibah dalam negeri yang berasal dari perorangan. (BA 999.02).
431112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana Lembaga/Badan Usaha
	Penerimaan hibah dalam negeri yang berasal dari Lembaga/Badan Usaha berbentuk badan hukum. (BA 999.02).
431119	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana Lainnya
	Penerimaan hibah dalam negeri yang tidak dapat dikategorikan berasal dari perorangan maupun Lembaga/Badan Usaha berbentuk badan hukum. (BA 999.02).
43112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga
431121	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Barang
	Untuk mencatat pendapatan hibah dari Dalam Negeri berbentuk barang.
431122	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Jasa
	Untuk mencatat pendapatan hibah dari Dalam Negeri berbentuk Jasa.
431123	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Surat Berharga
	Cukup jelas.
43113	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Uang
431131	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Perorangan
	Penerimaan hibah dalam negeri langsung yang berasal dari perorangan (BA 999.02).
431132	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Lembaga/Badan Usaha
	Penerimaan hibah dalam negeri langsung yang berasal dari Lembaga/Badan Usaha berbentuk badan hukum (BA 999.02).

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
431133	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Pemerintah Daerah Cukup jelas.
431139	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Lainnya Penerimaan hibah dalam negeri langsung yang tidak dapat dikategorikan berasal dari perorangan maupun Lembaga/Badan Usaha berbentuk badan hukum (BA 999.02).
4312	Pendapatan Hibah Luar Negeri
43121	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana
431211	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Perorangan Penerimaan hibah luar negeri yang berasal dari perorangan. (BA 999.02).
431212	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Bilateral Penerimaan hibah luar negeri yang berasal dari Lembaga Internasional dalam hubungan bilateral. (BA 999.02).
431213	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Multilateral Penerimaan hibah luar negeri yang berasal dari Lembaga Internasional dalam hubungan multilateral. (BA 999.02).
431219	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Lainnya Penerimaan hibah luar negeri yang tidak dapat dikategorikan berasal Lembaga Internasional baik dalam hubungan bilateral maupun multilateral. (BA 999.02).
43122	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga
431221	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Barang Untuk mencatat pendapatan hibah dari Luar Negeri berbentuk barang.
431222	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Jasa Untuk mencatat pendapatan hibah dari Luar Negeri berbentuk Jasa.
431223	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Surat Berharga Cukup jelas.
43123	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang
431231	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Perorangan Penerimaan hibah luar negeri langsung yang berasal dari perorangan (BA 999.02).
431232	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Bilateral Penerimaan hibah luar negeri langsung yang berasal dari Lembaga Internasional dalam hubungan bilateral (BA 999.02).
431233	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Multilateral Penerimaan hibah luar negeri langsung yang berasal dari Lembaga Internasional dalam hubungan multilateral (BA 999.02).
431239	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Lainnya Penerimaan hibah luar negeri langsung yang tidak dapat dikategorikan berasal Lembaga Internasional baik dalam hubungan bilateral maupun multilateral (BA 999.02).
43124	Pendapatan Hibah Luar Negeri yang Langsung Diterushibahkan
431241	Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Barang yang Langsung Diterushibahkan Cukup jelas.
431242	Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Jasa yang Langsung Diterushibahkan Cukup jelas.
431243	Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Surat Berharga yang Langsung Diterushibahkan Cukup jelas.

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
5	BELANJA NEGARA
51	BELANJA PEGAWAI
511	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
51111	Belanja Gaji PNS
511111	Belanja Gaji Pokok PNS Pengeluaran untuk pembayaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil.
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS Pengeluaran untuk pembayaran pembulatan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil.
51112	Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/istri PNS.
511122	Belanja Tunj. Anak PNS Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anak PNS.
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural PNS.
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan fungsional PNS.
511125	Belanja Tunj. PPh PNS Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan PPh PNS.
511126	Belanja Tunj. Beras PNS Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan beras berbentuk uang maupun natura.
511127	Belanja Tunj. Kemahalan PNS Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kemahalan PNS.
511128	Belanja Tunj. Lauk pauk PNS Pengeluaran untuk pembayaran dana lauk pauk yang diberikan kepada para pegawai negeri sehubungan dengan sifat tugas yang dilaksanakannya (organik dan non organik).
511129	Belanja Uang Makan PNS Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan uang makan PNS.
51113	Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS
511131	Belanja Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan PNS.
511132	Belanja Tunj. Cacat PNS Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan cacat PNS.
511133	Belanja Tunj. Khusus Peralihan PNS Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan khusus peralihan PNS.
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kompensasi kerja PNS, termasuk tunjangan pengaman dan penyelamatan pelayaran, dan tunjangan kesyahbandaran yang pembayarannya selama ini berdasarkan SE DJA tanggal 28-05-1983 No. SE 74/A.23/1893, tgl 15-11-1993 NO SE 169/A.72/1983 dan tgl 02-12-1987 No. SE 83-/A.198/1987, termasuk Tunjangan Kompensasi Karya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tunjangan Kompensasi Kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan (pagu tidak bersifat terbuka).
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan daerah terpencil/sangat terpencil PNS.
511136	Belanja Tunj. Guru/Dosen/PNS Yang Dipekerjakan Pada Sekolah/PT Swasta/Badan/Komisi

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
511137	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan guru/dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS.
	Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS
511138	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan tugas belajar tenaga pengajar biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS.
	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS
511139	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan khusus PNS Papua.
	Belanja Tunjangan SAR PNS
51114	Belanja Tunjangan Search and Rescue untuk Pegawai Negeri Sipil.
	Belanja Tunjangan-tunjangan III Pegawai Negeri/Staff di Luar Negeri
511141	Belanja Tunj. Sewa Rumah PNS (Staff di LN)
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan sewa rumah PNS (staff di LN).
511142	Belanja Tunj. Restitusi Pengobatan PNS (Staff di LN)
	Pengeluaran untuk penggantian pembayaran tunjangan Pengobatan PNS (staff di LN).
511143	Belanja Tunj. Social Security PNS (Staff di LN)
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan jaminan sosial PNS (staff di LN).
511144	Belanja Tunj. Asuransi Kecelakaan PNS (Staff di LN)
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan asuransi kecelakaan PNS (staff di LN).
511145	Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (Staff di LN)
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (staff di LN).
511146	Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (Staff di LN)
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (staff di LN).
511147	Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri.
511149	Belanja Lokal Staff Lainnya
	Pengeluaran untuk pembayaran gaji, tunjangan dan uang lembur lokal staff.
51115	Belanja Tunjangan Tunjangan IV PNS
	Belanja Tunjangan Umum PNS
511151	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan umum/tambahan tunjangan umum PNS, termasuk PNS TNI/Polri sesuai Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2006.
	Belanja Tunjangan Profesi Guru
511152	Digunakan untuk pembayaran tunjangan profesi guru PNS yang telah lulus ujian sertifikasi guru dan mendapatkan NIRG (Nomor Induk Registrasi Guru).
	Belanja Tunjangan Profesi Dosen
511153	Digunakan untuk pembayaran tunjangan profesi dosen PNS yang telah lulus ujian sertifikasi dosen.
	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor
511154	Digunakan untuk pembayaran tunjangan kehormatan profesor yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
	Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS
511155	Digunakan untuk mencatat Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS bagi yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru.
	Belanja Tunjangan Khusus Guru/Dosen
511156	Digunakan untuk Belanja Tunjangan Khusus Guru/Dosen PNS.
	51116
511161	Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil TNI/Polri.
511169	Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
	Pengeluaran untuk pembayaran pembulatan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil TNI/Polri.
51117	Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS TNI/Polri
511171	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/istri PNS TNI/Polri.
511172	Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural PNS TNI/Polri.
511173	Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural PNS TNI/Polri.
511174	Belanja Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan fungsional PNS TNI/Polri.
511175	Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan PPh PNS TNI/Polri.
511176	Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan beras berbentuk uang maupun natura. untuk PNS TNI/Polri.
511177	Belanja Tunj. Kemahalan PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kemahalan PNS TNI Polri.
511178	Belanja Tunj. Lauk pauk PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran dana lauk pauk yang diberikan kepada para pegawai negeri sehubungan dengan sifat tugas yang dilaksanakannya (organik dan non organik) untuk PNS TNI/Polri.
511179	Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan uang makan PNS TNI/Polri.
51118	Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS TNI/Polri
511181	Belanja Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan PNS TNI/Polri.
511182	Belanja Tunj. Cacat PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan cacat PNS TNI/Polri.
511183	Belanja Tunj. Khusus Peralihan PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan khusus peralihan PNS TNI/Polri.
511184	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kompensasi kerja PNS, termasuk tunjangan pengaman dan penyelamatan pelayaran, dan tunjangan kesyahbandaran yang pembayarannya selama ini berdasarkan SE DJA tanggal 28-05-1983 No. SE 74/A.23/1893, tgl 15-11-1993 NO SE 169/A.72/1983 dan tgl 02-12-1987 No. SE 83-/A.198/1987.
511185	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan daerah terpencil/sangat terpencil PNS.
511187	Belanja Tunj. Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan guru/dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS.
511188	Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan tugas belajar tenaga pengajar biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS.
511189	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan khusus PNS Papua.
51119	Belanja Tunjangan-tunjangan III PNS TNI/POLRI
511191	Belanja Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Medis PNS TNI/POLRI.

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
511192	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan lain-lain termasuk uang duka TNI/POLRI termasuk tunjangan cacat.
511193	Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri Pengeluaran untuk pembayaran Tunjangan Umum PNS TNI/Polri.
511194	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/Polri Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kompensasi kerja bidang persandian PNS TNI/POLRI.
511195	Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan pada pulau terluar dan wilayah perbatasan PNS TNI Digunakan untuk mencatat Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan bagi PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan sesuai dengan Perpres No.49 Tahun 2010.
5112	Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri
51121	Belanja Gaji TNI/POLRI
511211	Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran gaji pokok TNI/POLRI.
511219	Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran pembulatan gaji pokok TNI/POLRI.
51122	Belanja Tunjangan-tunjangan I TNI/POLRI
511221	Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/istri TNI/POLRI.
511222	Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anak TNI/POLRI.
511223	Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural TNI/POLRI.
511224	Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan fungsional TNI/POLRI.
511225	Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan PPh TNI/POLRI.
511226	Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan beras berbentuk uang maupun natura TNI/POLRI.
511227	Belanja Tunj. Kemahalan TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kemahalan TNI/POLRI, termasuk tunjangan daerah terpencil POLRI yang pembayarannya selama ini berdasarkan SE bersama DJA dan Polri No. SE 141/A/2001 dan No. Pol/16/X/2001.
511228	Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran dana lauk pauk yang diberikan kepada Anggota TNI/POLRI sehubungan dengan sifat tugas yang dilaksanakannya (organik dan non organik).
511229	Belanja Uang Makan TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan uang makan TNI/POLRI.
51123	Belanja Tunjangan-tunjangan II TNI/POLRI
511231	Belanja Tunj. Anggota Cadangan TNI DDA TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anggota cadangan TNI DDA TNI/POLRI.
511232	Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kowan/polwan TNI TNI/POLRI.
511233	Belanja Tunj. Babinkamtibmas TNI/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Babinsa TNI/POLRI.
511234	Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI/POLRI

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan khusus Papua untuk TNI dan PNS TNI/POLRI.
511235	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kompensasi kerja bidang persandian TNI TNI/POLRI.
511236	Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan brevet TNI/POLRI.
511237	Belanja Tunj. Keahlian/Keterampilan TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan keahlian/keterampilan TNI/POLRI.
511238	Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan keterampilan khusus TNI/POLRI.
511239	Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan pada Pulau Terluar dan Wilayah Perbatasan TNI
	Digunakan untuk mencatat Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan bagi prajurit TNI yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau terkecil terluar dan wilayah perbatasan sesuai dengan Perpres No.49 Tahun 2010.
51124	Belanja Tunjangan-tunjangan III TNI/POLRI
511241	Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Medis TNI/POLRI.
511242	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan lain-lain termasuk uang duka TNI/POLRI termasuk tunjangan cacat.
511243	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan terpencil/sangat terpencil TNI/POLRI.
511244	Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan umum/tambahan tunjangan umum TNI/POLRI sesuai Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2006.
511245	Belanja Santunan Cacat TNI
	Santunan yang diberikan kepada anggota TNI yang mengalami cacat dalam menjalankan tugas sesuai dengan PP Nomor 56 Tahun 2007 tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit TNI.
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara
51131	Belanja Gaji Pejabat Negara
511311	Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran gaji pokok pejabat Negara.
511319	Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran pembulatan gaji pokok pejabat negara.
51132	Belanja Tunjangan-tunjangan I Pejabat Negara
511321	Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/istri pejabat negara.
511322	Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anak pejabat negara.
511323	Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural pejabat negara.
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan PPh pejabat negara.
511325	Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan beras pejabat negara.
51133	Belanja Tunjangan-tunjangan II Pejabat Negara
511331	Belanja Tunj. Komunikasi Intensif Pejabat Negara

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan komunikasi intensif pejabat negara.
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan uang kehormatan pejabat negara.
511333	Belanja Uang Paket Harian Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan paket harian pejabat negara.
511334	Belanja Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan penunjang kegiatan dewan pejabat negara.
511335	Belanja Pelayanan Sidang dan Penyelesaian Tugas Mendesak Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan pelayanan sidang dan penyelesaian tugas mendesak pejabat negara.
511336	Belanja Tunjangan Pembinaan Kegiatan dan Khusus BPK Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan pembinaan kegiatan dan khusus BPK pejabat Negara.
511337	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan lain-lain termasuk uang duka pejabat negara.
511338	Belanja Tunjangan Fasilitas KPK
	Untuk pembayaran tunjangan pejabat KPK seperti fasilitas yang diterima.
5114	Belanja Gaji Dokter PTT
51141	Belanja Gaji Dokter PTT
511411	Belanja Gaji Dokter dan Bidan PTT
	Pengeluaran untuk pembayaran gaji Dokter dan Bidan PTT.
511412	Belanja Tunjangan Pajak PPh Dokter dan Bidan PTT
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan pajak PPh Dokter dan Bidan PTT.
511413	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT.
511414	Belanja Tunjangan Dokter dan Bidan PTT
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Dokter dan Bidan PTT termasuk tunjangan uang duka wafat (UDW).
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS
51151	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS
511511	Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran gaji pokok Pegawai Non PNS pada Lembaga/Komisi.
511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Pegawai Non PNS pada Lembaga/Komisi.
511513	Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS pada Lembaga/Komisi.
511519	Belanja Tunjangan Lainnya Non PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan lainnya Pegawai Non PNS pada Lembaga/Komisi.
512	BELANJA HONORARIUM/LEMBUR/VAKASI/TUNJ. KHUSUS & BELANJA PEGAWAI TRANSITO
5121	Belanja Honorarium
51211	Belanja Honorarium
512111	Belanja Uang Honor Tetap
	Digunakan untuk pembayaran honor tetap, termasuk honor Pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai dalam rangka mendukung Tugas Pokok dan Fungsi unit organisasi yang bersangkutan.
5122	Belanja Lembur
51221	Belanja Lembur
512211	Belanja Uang Lembur

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
	Pengeluaran untuk pembayaran uang lembur termasuk uang makan yang dibayarkan dalam rangka lembur.
5123	Belanja Vakasi
51231	Belanja Vakasi
512311	Belanja Vakasi
	Pengeluaran untuk pembayaran imbalan untuk penguji atau pemeriksa kertas / jawaban ujian.
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito
51241	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)
	Digunakan untuk pembayaran tunjangan khusus/kegiatan dan pembiayaan kepegawaian lainnya di dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
512412	Belanja Pegawai Transito
	Digunakan untuk pengeluaran sebagian belanja pegawai di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dialihkan ke daerah dan kantor-kantor di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi.
512413	Belanja Pembayaran Uang Kompensasi Bagi PNS yang Diberhentikan Sebagai Dampak Reformasi Birokrasi
	Belanja pembayaran uang kompensasi atas PNS yang diberhentikan sebagai dampak reformasi birokrasi, digunakan untuk pembayaran uang kompensasi bagi PNS yang diberhentikan sebelum batas usia pensiun yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan kepegawaian, sebagai dampak pelaksanaan reformasi birokrasi.
513	BELANJA KONTRIBUSI SOSIAL
5131	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu
51311	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS dan Pejabat Negara
513111	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun PNS Pusat dan uang tunggu bagi PNS yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
513112	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Daerah
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun PNS Daerah dan uang tunggu bagi PNS Daerah yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
513113	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS TNI/Kemhan
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun PNS TNI/Kemhan dan uang tunggu bagi PNS TNI/Kemhan yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
513114	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Polri
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun PNS Polri dan uang tunggu bagi PNS Polri yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
513115	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Eks Pegadaian
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun PNS Eks Pegadaian dan uang tunggu bagi PNS Daerah yang tengah menunggu proses pensiun sbelim mencapai usia pensiun.
51312	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri
513121	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri (Lama)
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun TNI/Polri yang pensiun sebelum 1 April 1989.
513122	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Kemhan
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun Prajurit TNI dan uang tunggu bagi Prajurit TNI yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
513123	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Polri
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun anggota Polri dan uang tunggu bagi anggota Polri yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
51313	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
513131	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun dan uang tunggu bagi Pejabat Negara yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
513132	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Hakim Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun dan uang tunggu bagi Hakim yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
51314	Belanja Kontribusi APBN sebagai pendanaan bersama dalam pembayaran pensiun eks PNS Kemhub pada PT KAI
513141	Kontribusi APBN Sebagai Pendanaan Bersama Dalam Pembayaran Pensiun Eks PNS Kemhub pada PT KAI Belanja dalam rangka pembayaran pensiun eks PNS Kementerian Perhubungan pada PT Kereta Api sebagai pelaksanaan dari PP No 64 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia.
51315	Belanja Pensiun Veteran dan PKRI/KNIP
513151	Belanja Tunjangan Veteran Digunakan untuk pembayaran tunjangan veteran RI.
513152	Belanja Dana Kehormatan Veteran Digunakan untuk pembayaran Dana Kehormatan Veteran.
513153	Belanja Tunjangan PKRI dan KNIP Digunakan untuk pembayaran tunjangan Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI) dan Komite Nasional Indonesia Pusat.
51316	Belanja Tunjangan Hari Tua
513161	Belanja Tunjangan Hari Tua (Unfunded Liability) Digunakan untuk pembayaran kewajiban pemerintah berupa Unfunded Liability (kekurangan Pendanaan) atas kenaikan Gaji Pokok Pegawai
5132	Belanja Asuransi Kesehatan
51321	Belanja Askes PNS/Pejabat Negara
513211	Belanja Askes PNS Digunakan untuk pembayaran iuran Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan Asuransi Kesehatan PNS.
513212	Belanja Askes Pejabat Negara Digunakan untuk pembayaran belanja Askes Pejabat Negara.
51322	Belanja Askes Penerima Pensiun
513221	Belanja Askes Penerima Pensiun Digunakan untuk pembayaran iuran Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Penerima Pensiun.
51323	Belanja Askes TNI/Kemhan
513231	Belanja Askes TNI/Kemhan Digunakan untuk pembayaran belanja Askes TNI/Kemhan.
51324	Belanja Askes Polri
513241	Belanja Askes Polri Digunakan untuk pembayaran belanja Askes Polri.
51325	Belanja Askes Veteran
513251	Belanja Askes Veteran Digunakan untuk pembayaran iuran kesehatan dalam rangka penyelenggaraan asuransi kesehatan veteran Penerima Tunjangan Veteran yang ditanggung pemerintah pusat.

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
5133	Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran
51331	Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran
513311	Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran Non Tuvet Digunakan untuk pembayaran iuran kesehatan dalam rangka penyelenggaraan asuransi kesehatan veteran Non Tuvet yang ditanggung pemerintah pusat.
5134	Belanja Cadangan Perubahan Sharing
51341	Belanja Cadangan Perubahan Sharing
513411	Belanja Cadangan Perubahan Sharing Digunakan untuk pembayaran cadangan perubahan sharing kepada pegawai.
52	BELANJA BARANG
521	BELANJA BARANG
5211	Belanja Barang Operasional
52111	Belanja Barang Operasional
521111	Belanja Keperluan Perkantoran Pengeluaran untuk membiayai keperluan sehari-hari perkantoran yang secara langsung menunjang kegiatan operasional Kementerian negara/ lembaga terdiri dari : - Satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yaitu pengadaan barang yang habis dipakai antara lain pembelian alat-alat tulis, barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, biaya minum/makanan kecil untuk rapat, biaya penerimaan tamu. - Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah pegawai antara lain biaya satpam/pengaman kantor, cleaning service, sopir, tenaga lepas (yang dipekerjakan secara kontraktual), telex, internet, komunikasi khusus diplomat, pengurusan penggantian sertifikat tanah yang hilang, pembayaran PBB. - Pengeluaran untuk membiayai pengadaan/penggantian inventaris yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kantor/satker di bawah nilai kapitalisasi. - Pembelian buku cek/buku giro bilyet. - Pembelian meterai.
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan Pengeluaran untuk pengadaan bahan makanan.
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Pengeluaran untuk membiayai pengadaan bahan makanan / minuman / obat-obatan yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan operasional kepada pegawai.
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Pengeluaran untuk membiayai Pengiriman surat menyurat dalam rangka kedinasan yang dibayarkan oleh Kementerian Negara/lembaga.
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja Honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan operasional kegiatan satuan kerja seperti, honor pejabat kuasa pengguna anggaran, honor pejabat pembuat komitmen, honor pejabat penguji SPP dan penanda tangan SPM, Honor Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka, Honor Staf Pengelola Keuangan, Honor Pengelola PNBK (honor atasan langsung, bendahara dan sekretariat), honor pengelola satuan kerja (yang mengelola gaji pada Kementerian Pertahanan), honor Tim SAI (Pengelola SAK dan SIMAKBMN). Honor Operasional Satuan Kerja merupakan honor yang menunjang kegiatan operasional yang bersangkutan dan pembayaran honoronya dilakukan secara terus menerus dari awal sampai dengan akhir tahun anggaran.
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya Pengeluaran untuk membiayai pengadaan barang yang tidak dapat ditampung dalam mata anggaran 521111, 521112, 521113, 521114, 521115 dalam rangka kegiatan operasional. Belanja Barang Operasional Lainnya dapat digunakan untuk belanja bantuan transport dalam kota, dalam rangka kegiatan operasional satker.

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
5212	Belanja Barang Non Operasional
52121	Belanja Barang Non Operasional
521211	Belanja Bahan Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis dipakai) seperti : - Alat tulis kantor (ATK); - Konsumsi/bahan makanan; - Bahan cetakan; - Dokumentasi; - Spanduk; - Biaya fotokopi; yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional seperti dies natalis, pameran, seminar, sosialisasi, rapat, diseminasi dan lain lain yang terkait langsung dengan output suatu kegiatan.
521212	Belanja Barang Transito Digunakan untuk pengeluaran pembiayaan belanja barang pada satuan kerja-satuan kerja yang baru dibentuk /UPT termasuk di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi atau satker yang tidak melekat pada Bagian Anggaran / Kementerian Negara / Lembaga serta bisa digunakan oleh satker lain yang telah diberikan persetujuan oleh Menkeu.
521213	Belanja Honor Output Kegiatan Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan output seperti : honor untuk Pelaksana Kegiatan Penelitian, honor penyuluh non PNS, Honor Tim Pelaksana Kegiatan (pengarah, penanggung jawab, koordinator, ketua, sekretaris, anggota dan staf sekretariat), Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pemeriksa Penerima Barang/Jasa, untuk pengadaan yang tidak menghasilkan Aset Tetap/Aset Lainnya. Honor Output Kegiatan dapat digunakan untuk biaya honor yang timbul sehubungan dengan/dalam rangka penyerahan barang kepada masyarakat. Honor Output Kegiatan merupakan honor yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang insidental dan dapat dibayarkan tidak terus menerus dalam satu tahun.
521214	Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI/Atase Teknis Digunakan untuk mencatat kerugian selisih kurs Uang Persediaan pada Satker Perwakilan RI di Luar Negeri dan Atase Teknis.
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam akun 521211, 521212, 521213, dan 521214. Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk belanja bantuan transport dalam kota dalam rangka kegiatan non operasional satker termasuk uang saku dan paket meeting (kontraktual). Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk biaya-biaya Crash Program. Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk pemberian beasiswa kepada pegawai di lingkup K/L atau di luar lingkup satker.
5215	Belanja Barang Pengganti Pajak Dalam Rangka Hibah MCC
52151	Belanja Barang Pengganti Pajak Pusat Dalam Rangka Hibah MCC
521511	Belanja Barang Pengganti PPN Dalam Rangka Hibah MCC Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Pengganti PPN dalam rangka Hibah MCC (Millenium Challenge Corporation).
521512	Belanja Barang Pengganti PPh Dalam Rangka Hibah MCC Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Pengganti PPh dalam rangka Hibah MCC (Millenium Challenge Corporation).
521513	Belanja Barang Pengganti Pajak Lainnya Dalam Rangka Hibah MCC Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Pengganti Pajak Lainnya dalam rangka Hibah MCC (Millenium

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
	Challenge Corporation).
52152	Belanja Barang Pengganti Pajak Pemda Dalam Rangka Hibah MCC
521521	Belanja Barang Pengganti Pajak Pemda Dalam Rangka Hibah MCC
	Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Pengganti Pajak Pemda dalam rangka Hibah MCC (Millenium Challenge Corporation).
5216	Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah
52161	Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah
521611	Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah
	Cukup jelas.
522	BELANJA JASA
5221	Belanja Jasa
52211	Belanja Langganan Daya dan Jasa
522111	Belanja Langganan Listrik
	Belanja langganan listrik, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan listrik.
522112	Belanja Langganan Telepon
	Belanja langganan telepon, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan telepon.
522113	Belanja Langganan Air
	Belanja langganan air, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan air.
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya
	Belanja langganan daya dan jasa lainnya, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan daya dan jasa lainnya.
52212	Belanja Jasa Pos dan Giro
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro
	Digunakan untuk pembayaran jasa perbendaharaan yang telah dilaksanakan oleh kantor pos diseluruh Indonesia.
52213	Belanja Jasa Konsultan
522131	Belanja Jasa Konsultan
	Digunakan untuk pembayaran jasa konsultan secara kontraktual termasuk jasa pengacara yang outputnya tidak menghasilkan Aset Lainnya.
52214	Belanja Sewa
522141	Belanja Sewa
	Digunakan untuk pembayaran sewa (misalnya sewa kantor/gedung/ruangan, atau sewa lainnya).
52215	Belanja Jasa Profesi
522151	Belanja Jasa Profesi
	Belanja untuk pembayaran honorarium narasumber yang diberikan kepada pegawai negeri/non-pegawai negeri sebagai narasumber, pembicara, praktisi, pakar yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat. Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan dengan ketentuan: - berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara; - berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I berkenaan/masyarakat.
52219	Belanja Jasa Lainnya
522191	Belanja Jasa Lainnya

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk pembayaran jasa yang tidak bisa ditampung pada kelompok akun 52211, 52212, 52213, 52214, dan 52215.
5223	Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah
52231	Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah
522311	Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah
	Cukup jelas.
523	BELANJA PEMELIHARAAN
5231	Belanja Pemeliharaan
52311	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
	- Pengeluaran pemeliharaan/perbaikan yang dilaksanakan sesuai dengan Stándar Biaya Umum. Dalam rangka mempertahankan gedung dan bangunan kantor dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sampai dengan 2%; dan
	- pemeliharaan/perawatan halaman/taman gedung/kantor agar berada dalam kondisi normal (tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan).
523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
	Pengeluaran untuk membiayai pemeliharaan rumah dinas dan rumah jabatan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas para pejabat seperti istana negara, rumah Jabatan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota/Mahkamah Agung/Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Pimpinan/Ketua Lembaga Non Kementerian/TNI/Polri/asrama yang terdapat di semua Kementerian/Lembaga Non Kementerian, termasuk TNI, Polri/Aula yang pisah dengan Gedung Kantor/Gedung Kesenian, Art Center/Gedung Museum beserta isinya termasuk taman, pagar agar berada dalam kondisi normal.
52312	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
	Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi syarat kriteria kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin.
523129	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pengeluaran lainnya untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi syarat kriteria kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin.
52313	Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
523131	Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan jalan dan jembatan agar berada dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi kriteria kapitalisasi jalan dan jembatan.
523132	Belanja Biaya Pemeliharaan Irigasi
	Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan irigasi agar berada dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
523133	Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan
	Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan jaringan agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi jaringan.
52319	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya
523199	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya
	Pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap selain gedung dan bangunan, peralatan dan mesin serta jalan, irigasi dan jaringan agar berada dalam kondisi normal termasuk pemeliharaan tempat ibadah, bangunan bersejarah seperti candi, bangunan peninggalan Belanda, Jepang yang belum diubah posisinya, kondisi bangunan/Bangunan Keraton/Puri bekas kerajaan, bangunan cagar valam, cagar budaya, makam yang memiliki

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
	nilai sejarah.
524	BELANJA PERJALANAN
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri
52411	Belanja Perjalanan Dalam Negeri
524111	Belanja Perjalanan Biasa
	Pengeluaran untuk perjalanan dinas seperti perjalanan dinas dalam rangka pembinaan/konsultasi, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan/pemeriksaan, mutasi pegawai, mutasi pensiun, pengiriman jenazah.
524112	Belanja Perjalanan Tetap
	Pengeluaran untuk perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk kegiatan pelayanan masyarakat. Contoh : perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama dan lainnya.
524119	Belanja Perjalanan Lainnya
	Pengeluaran untuk perjalanan lainnya dalam rangka pendukung kegiatan kementerian negara/lembaga yang tidak tertampung di dalam pos belanja perjalanan biasa dan tetap. Belanja Perjalanan Lainnya dapat digunakan untuk transport dalam rangka perjalanan dinas apabila perjalanan dinas dimaksud memenuhi kriteria dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Termasuk biaya pertemuan, seminar dan rapat (swakelola), untuk uang harian dan transport kegiatan rapat luar kota (full board).
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri
52421	Belanja Perjalanan Luar Negeri
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri
	Pengeluaran untuk perjalanan dinas seperti perjalanan dinas dalam rangka pembinaan/konsultasi, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan/pemeriksaan, mutasi pegawai, mutasi pensiun, pengiriman jenazah untuk kepentingan dinas di / ke luar negeri.
524212	Belanja Perjalanan Tetap - Luar Negeri
	Pengeluaran untuk perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh kementerian Negara/lembaga untuk kegiatan pelayanan warga di / ke luar negeri Contoh perjalanan dinas oleh tenaga ahli di kedutaan besar atau atase.
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri
	Pengeluaran untuk perjalanan lainnya dalam rangka pendukung kegiatan kementerian negara/lembaga yang tidak tertampung di dalam pos belanja perjalanan biasa dan tetap antara lain biaya perjalanan teknis operasional kegiatan bagi kedutaan besar atau atase di luar negeri.
525	BELANJA BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
5251	Belanja Barang BLU
52511	Belanja Barang dan Jasa BLU
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan
	Pengeluaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BLU.
525112	Belanja Barang
	Pengeluaran untuk pembelian barang untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU.
525113	Belanja Jasa
	Pengeluaran untuk memperoleh jasa untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU.
525114	Belanja Pemeliharaan
	Pengeluaran untuk pemeliharaan BMN BLU.
525115	Belanja Perjalanan
	Pengeluaran untuk pembayaran perjalanan dinas pegawai BLU.

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
525116	Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund Digunakan untuk mencatat biaya-biaya yang digunakan untuk pengelolaan Endowment Fund dan Dana Cadangan Pendidikan oleh BLU Bidang Pendidikan atau yang ditunjuk pada Kementerian Keuangan sesuai maksud pembentukannya.
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Pengeluaran untuk keperluan diluar akun 525111, 525112, 525113, 525114, 525115 dan 525116 untuk menunjang kegiatan BLU yang bersangkutan.
526	BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMDA
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda
52611	Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda
526111	Belanja Tanah Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Digunakan untuk pengadaan barang berupa tanah oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah.
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Digunakan untuk pengadaan barang berupa peralatan dan mesin oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah.
526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Digunakan untuk pengadaan Barang berupa Gedung dan Bangunan oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah.
526114	Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Digunakan untuk pengadaan Barang berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah.
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Digunakan untuk pengadaan Barang Fisik Lainnya oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah, termasuk belanja barang fisik lain Tugas Pembantuan.
5262	Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada pemerintah daerah
52621	Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada pemerintah daerah
526211	Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembelian/pengadaan barang terkait dengan kegiatan pendukung atas kegiatan utama Dana Dekonsentrasi. Pembelian/Pengadaan tersebut menghasilkan BMN untuk diserahkan kepada pemerintah daerah melalui SKPD. Apabila aset itu dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah realisasi pengadaan, belum diserahkan ke pemda, atau pemda tidak bersedia menerima, maka aset dimaksud harus direklasifikasi dari Persediaan menjadi Aset Tetap (AT).
526212	Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembelian/pengadaan barang terkait dengan kegiatan pendukung atas kegiatan utama Dana Tugas Pembantuan. Pembelian/Pengadaan tersebut menghasilkan BMN untuk diserahkan kepada pemerintah daerah melalui SKPD. Apabila aset itu dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah realisasi pengadaan, belum diserahkan ke pemda, atau pemda tidak bersedia menerima, maka aset dimaksud harus direklasifikasi dari Persediaan menjadi Aset Tetap (AT).
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda
52631	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda
526311	Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah yang tidak dapat dialokasikan pada kelompok akun 5261 dan 5262.
53	BELANJA MODAL
531	BELANJA MODAL TANAH
5311	Belanja Modal Tanah
53111	Belanja Modal Tanah
531111	Belanja Modal Tanah
	Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran - pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/ pakai (swakelola/kontraktual).
531112	Belanja Modal Pembebasan Tanah
	Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pembebasan, balik nama, pengosongan, serta pengeluaran - pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi secara swakelola sampai tanah tersebut siap digunakan/ pakai (swakelola).
531113	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah
	Pengeluaran untuk pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap digunakan/dipakai (swakelola).
531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah
	Pengeluaran yang dilakukan untuk pembuatan sertifikat tanah pada saat pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap digunakan/dipakai (swakelola).
531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
	Pengeluaran yang dilakukan untuk pengurukan/penimbunan, perataan dan pematangan tanah pada saat pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap digunakan/dipakai (swakelola).
531116	Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah
	Pengeluaran yang dilakukan untuk pengukuran tanah pada saat pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap digunakan/dipakai (swakelola).
531117	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
	Pengeluaran yang dilakukan untuk kepentingan perjalanan dinas dalam rangka pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap digunakan/dipakai (swakelola).
5312	Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari Hibah
53121	Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari Hibah
531211	Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari Hibah
	Cukup jelas.
532	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
53211	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
	Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
532112	Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin
	Pengeluaran untuk pengadaan bahan baku peralatan dan mesin pada saat pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola.

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
532113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin Pengeluaran untuk pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin siap digunakan.
532114	Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin Pengeluaran untuk pembayaran sewa ruangan,sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
532115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin Pengeluaran untuk pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
532116	Belanja Modal Perijinan Peralatan dan Mesin Pengeluaran untuk pembayaran biaya perijinan yang diperlukan pada saat pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
532117	Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin Pengeluaran untuk pembayaran biaya pemasangan dan instalasi pada saat pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
532118	Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin Pengeluaran untuk pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
53212	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin Belanja Modal setelah perolehan peralatan dan mesin yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja; dan memenuhi batasan minimum kapitalisasi sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur batasan minimum kapitalisasi.
5322	Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan Peralatan dan Mesin dari Hibah
53221	Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan Peralatan dan Mesin dari Hibah
532211	Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan Peralatan dan Mesin dari Hibah Cukup jelas.
533	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
53311	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya kontruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak (kontraktual).
533112	Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan Pengeluaran untuk pengadaan bahan baku Gedung dan Bangunan pada saat pengadaan Gedung dan Bangunan secara swakelola.
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan Pengeluaran untuk pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan gedung dan bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan.
533114	Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan Pengeluaran untuk pembayaran sewa ruangan, sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat pengadaan gedung dan bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan tersebut siap digunakan.
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Pengeluaran untuk pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan gedung dan

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
	bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan tersebut siap digunakan.
533116	Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan Pengeluaran untuk pembayaran biaya perizinan yang diperlukan pada saat pengadaan gedung dan bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan tersebut siap digunakan.
533117	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Gedung dan Bangunan Pengeluaran untuk pembayaran biaya pengosongan, pembongkaran bangunan lama pada saat pembangunan gedung dan bangunan secara swakelola.
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan Pengeluaran untuk pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan gedung dan bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan tersebut siap digunakan.
53312	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Belanja Modal setelah perolehan gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja; dan memenuhi batasan minimum kapitalisasi sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur batasan minimum kapitalisasi.
5332	Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Pencatatan Gedung dan Bangunan dari Hibah
53321	Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Pencatatan Gedung dan Bangunan dari Hibah
533211	Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Pencatatan Gedung dan Bangunan dari Hibah Cukup jelas.
534	BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
53411	Belanja Modal Jalan dan Jembatan
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan tersebut siap pakai.
534112	Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan Pengeluaran untuk pengadaan bahan baku Jalan dan Jembatan pada saat pengadaan jalan dan jembatan secara swakelola.
534113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan jembatan Pengeluaran untuk pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan jalan dan jembatan secara swakelola sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
534114	Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan Pengeluaran untuk pembayaran sewa ruangan, sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat pengadaan jalana dan jembatan secara swakelola sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
534115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Pengeluaran untuk pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan jalan dan jembatan secara swakelola sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
534116	Belanja Modal Perizinan Jalan dan Jembatan Pengeluaran untuk pembayaran biaya perizinan yang diperlukan pada saat pengadaan jalan dan jembatan secara swakelola sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
534117	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Jalan dan Jembatan Pengeluaran untuk pembayaran biaya pengosongan, pembongkaran bangunan lama pada saat pembangunan jalan dan jembatan secara swakelola.
534118	Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan Pengeluaran untuk pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan jalan dan jembatan secara

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
	swakelola sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
53412	Belanja Modal Irigasi
534121	Belanja Modal Irigasi
	Pengeluaran untuk memperoleh irigasi sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai irigasi tersebut siap pakai.
534122	Belanja Modal Bahan Baku Irigasi
	Pengeluaran untuk pengadaan bahan baku irigasi pada saat pengadaan irigasi secara swakelola.
534123	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi
	Pengeluaran untuk pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan irigasi secara swakelola sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.
534124	Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi
	Pengeluaran untuk pembayaran sewa ruangan,sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat pengadaan irigasi secara swakelola sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.
534125	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan irigasi secara swakelola sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.
534126	Belanja Modal Perijinan Irigasi
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya perijinan yang diperlukan pada saat pengadaan irigasi secara swakelola sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.
534127	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Irigasi
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya pengosongan, pembongkaran bangunan lama pada saat pembangunan irigasi secara swakelola.
534128	Belanja Modal Perjalanan Irigasi
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan irigasi secara swakelola sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.
53413	Belanja Modal Jaringan
534131	Belanja Modal Jaringan
	Pengeluaran untuk memperoleh jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jaringan tersebut siap pakai.
534132	Belanja Modal Bahan Baku Jaringan
	Pengeluaran untuk pengadaan bahan baku jaringan pada saat pengadaan jaringan secara swakelola.
534133	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan
	Pengeluaran untuk pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan jaringan secara swakelola sampai dengan jaringan tersebut siap digunakan.
534134	Belanja Modal Sewa Peralatan Jaringan
	Pengeluaran untuk pembayaran sewa ruangan,sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat pengadaan jaringan secara swakelola sampai dengan jaringan tersebut siap digunakan.
534135	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan jaringan secara swakelola sampai dengan jaringan tersebut siap digunakan.
534136	Belanja Modal Perijinan Jaringan
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya perijinan yang diperlukan pada saat pengadaan jaringan secara swakelola sampai dengan jaringan tersebut siap digunakan.
534137	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Jaringan
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya pengosongan, pembongkaran bangunan lama pada saat pembangunan jaringan secara swakelola.

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
534138	Belanja Modal Perjalanan Jaringan Pengeluaran untuk pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan jaringan secara swakelola sampai dengan jaringan tersebut siap digunakan.
53414	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan
534141	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan Belanja Modal setelah perolehan jalan dan jembatan yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja.
53415	Belanja Penambahan Nilai Irigasi
534151	Belanja Penambahan Nilai Irigasi Belanja Modal setelah perolehan irigasi yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja.
53416	Belanja Penambahan Nilai Jaringan
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan Belanja Modal setelah perolehan jaringan yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja.
5342	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah
53421	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah
534211	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah Cukup jelas.
536	BELANJA MODAL LAINNYA
5361	Belanja Modal Lainnya
53611	Belanja Modal Lainnya
536111	Belanja Modal Lainnya Pengeluaran untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Pengeluaran untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya sampai dengan siap digunakan. Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pengadaan software, pengembangan website, pengadaan lisensi yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun baik secara swakelola maupun dikontrakkan kepada Pihak Ketiga. Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pembangunan aset tetap renovasi yang akan diserahkan kepada entitas lain dan masih di lingkungan pemerintah pusat. Untuk Aset Tetap Renovasi yang nantinya akan diserahkan kepada entitas lain berupa Gedung dan Bangunan mengikuti ketentuan batasan minimal kapitalisasi. Termasuk dalam belanja modal lainnya : pengadaan/pembelian barang-barang kesenian, dan koleksi perpustakaan.
53612	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya Belanja Modal setelah perolehan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja. Untuk penambahan nilai Aset Tetap Renovasi yang nantinya akan diserahkan kepada entitas lain berupa Gedung dan Bangunan mengikuti ketentuan batasan minimal kapitalisasi.
5362	Belanja Modal Lainnya untuk Pencatatan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari Hibah
53621	Belanja Modal Lainnya untuk Pencatatan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari Hibah

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
536211	Belanja Modal Lainnya untuk Pencatatan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari Hibah Cukup jelas.
537	BELANJA MODAL BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
5371	Belanja Modal BLU
53711	Belanja Modal BLU
537111	Belanja Modal Tanah - BLU Belanja Modal Tanah BLU.
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU.
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU.
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU.
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU Belanja Modal Lainnya BLU.
54	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG
541	BELANJA PEMBAYARAN BUNGA UTANG
5411	Belanja Pembayaran Bunga Utang DN – Jangka Pendek
54111	Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara
541111	Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara – Rupiah Digunakan untuk pembayaran beban bunga terhadap penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dalam negeri dan surat Berharga lainnya.
541119	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Surat Perbendaharaan Negara Digunakan untuk pengeluaran kewajiban pemerintah lainnya terhadap bunga Surat perbendaharaan Negara dalam negeri.
5412	Belanja Pembayaran Bunga Utang DN – Jangka Panjang
54121	Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara
541211	Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Rupiah Digunakan untuk pembayaran beban bunga Obligasi Dalam Negeri yang harus dibayar oleh pemerintah.
541219	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Obligasi Negara Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya Obligasi Negara.
54122	Belanja Pembayaran Bunga Dalam Negeri Jangka Panjang Lainnya
541221	Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan Cukup jelas.
541229	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Obligasi Negara Lainnya Cukup jelas.
54123	Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri
541231	Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri Cukup jelas.
541232	Belanja Biaya/Kewajiban Lainnya terhadap Pinjaman DN Cukup jelas.
5413	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri
54131	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang
541311	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang Digunakan untuk pembayaran Imbalan Surat berharga Syariah Negara Jangka panjang.

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
541312	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Panjang Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya Imbalan SSBN Jangka Panjang.
54132	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek
541321	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek Digunakan untuk pembayaran Imbalan Surat berharga Syariah Negara Jangka pendek.
541322	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Pendek Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya Imbalan SSBN Jangka Panjang.
54133	Belanja Pembayaran Imbalan SPN Syariah
541331	Belanja Pembayaran Imbalan SPN Syariah Cukup jelas.
541332	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya-Imbalan SPN Syariah Cukup jelas.
5414	Belanja Pembayaran Bunga Utang LN – Jangka Panjang
54141	Belanja Bunga Pinjaman program
541411	Belanja Bunga Pinjaman Program Digunakan untuk pembayaran beban bunga pinjaman program atau nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan serta pinjaman yang dapat dirupiahkan.
541419	Belanja Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program Digunakan untuk pengeluaran biaya/kewajiban pemerintah lainnya terhadap utang luar negeri jangka panjang dalam rangka pinjaman program.
54142	Belanja Bunga Pinjaman proyek
541421	Belanja Bunga Pinjaman Proyek Digunakan untuk pembayaran beban bunga pinjaman proyek atau nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri di luar pinjaman program.
541429	Belanja Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek Digunakan untuk pengeluaran biaya/kewajiban pemerintah lainnya terhadap utang luar negeri jangka panjang dalam rangka pinjaman proyek.
54143	Belanja Bunga Obligasi Negara
541431	Belanja Bunga Obligasi Negara – Valas Digunakan untuk pembayaran beban bunga terhadap penerbitan Obligasi pemerintah dalam bentuk valas.
541439	Belanja Biaya/kewajiban Lainnya – Bunga Obligasi Negara Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya dan bunga Obligasi negara yang harus dibayar oleh pemerintah.
54144	Belanja Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman
541441	Belanja Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Program Digunakan untuk pembayaran beban bunga terhadap utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Program.
541442	Belanja Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Proyek Digunakan untuk pembayaran beban bunga terhadap utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Proyek.
541449	Belanja Biaya/Kewajiban Lainnya – Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya - bunga utang LN melalui penjadualan kembali pinjaman.
54145	Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara
541451	Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara – Valuta Asing Digunakan untuk pembayaran beban bunga Surat Perbendaharaan Negara dalam bentuk valas yang harus dibayar oleh pemerintah.
541459	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Bunga Surat Perbendaharaan Negara

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk pengeluaran rutin pembayaran biaya/kewajiban lainnya - Bunga Surat Perbendaharaan Negara dalam bentuk valuta asing.
5415	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri
54151	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang
541511	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang - Valas
	Digunakan untuk pembayaran Imbalan Surat berharga Syariah Negara Jangka panjang.
541519	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Imbalan SBSN Jangka Panjang - Valas
	Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya Imbalan SBSN Jangka Panjang.
54152	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek
541521	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek - Valas
	Digunakan untuk pembayaran Imbalan Surat berharga Syariah Negara Jangka Pendek.
541529	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Imbalan SBSN Jangka Pendek - Valas
	Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya Imbalan SBSN Jangka Pendek.
542	BELANJA PEMBAYARAN DISCOUNT SURAT UTANG NEGARA DALAM NEGERI
5421	Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri
54211	Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri
542111	Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri
	Digunakan untuk pembayaran discount yang diberikan atas penerbitan surat perbendaharaan Negara Dalam Negeri.
542119	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri
	Digunakan untuk pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri.
54212	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri
542121	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri
	Digunakan untuk pembayaran discount yang diberikan atas penerbitan obligasi Negara Dalam Negeri.
542129	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Obligasi Negara Dalam Negeri
	Digunakan untuk pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount obligasi Dalam Negeri.
543	BELANJA PEMBAYARAN DISCOUNT SURAT UTANG NEGARA LUAR NEGERI
5431	Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Luar Negeri
54311	Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri
543111	Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri
	Digunakan untuk pembayaran Discount Surat Utang Perbendaharaan Negara Luar Negeri.
543119	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri
	Digunakan untuk pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri.
54312	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri
543121	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri
	Digunakan untuk pembayaran Discount Surat Utang Perbendaharaan Negara Luar Negeri.
543129	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Obligasi Negara Luar Negeri
	Digunakan untuk pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Obligasi Negara Luar Negeri.
544	BELANJA PEMBAYARAN LOSS ON BOND REDEMPTION
5441	Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Dalam Negeri
54411	Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Dalam Negeri
544111	Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Dalam Negeri
	Digunakan untuk mencatat beban yang timbul dari selisih lebih clean price yang dibayar Pemerintah pada saat pembelian kembali SUN (buyback) dengan carrying value SUN. carrying value SUN ialah nilai nominal SUN

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
	setelah dikurangi atau ditambah unamortized discount atau premium.
545	BELANJA PEMBAYARAN DISCOUNT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DALAM NEGERI
5451	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri
54511	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Panjang
545111	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Panjang
	Cukup jelas.
545119	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount SBSN Jangka Panjang
	Cukup jelas.
54512	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Pendek
545121	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Pendek
	Cukup jelas.
545129	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount SBSN Jangka Pendek
	Cukup jelas.
54513	Belanja Pembayaran Discount SPN
545131	Belanja Pembayaran Discount SPN
	Cukup jelas.
545139	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya-Discout SPN
	Cukup jelas.
546	BELANJA PEMBAYARAN DISCOUNT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA LUAR NEGERI
5461	Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri
54611	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Panjang
546111	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Panjang - Valas
	Cukup jelas.
546119	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount SBSN Jangka Panjang - Valas
	Cukup jelas.
54612	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Pendek
546121	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Pendek - Valas
	Cukup jelas.
546129	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount SBSN Jangka Pendek - Valas
	Cukup jelas.
547	BELANJA DENDA
5471	Belanja Pembayaran Denda
54711	Belanja Pembayaran Imbalan Bunga
547111	Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Pajak (SPM-IB Pajak)
	Digunakan untuk pembayaran imbalan bunga atas kelalaian pemerintah membayar kembali pengembalian kelebihan pajak (restitusi).
547112	Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan
	Digunakan untuk pembayaran imbalan bunga atas pinjaman perbankan.
547113	Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Bea dan Cukai (SPM-IB Bea dan Cukai)
	Digunakan untuk pembayaran imbalan bunga atas kelalaian pemerintah membayar kembali pengembalian kelebihan bea dan cukai.
547119	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Bunga Dalam Negeri Jangka Pendek Lainnya
	Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya - Bunga dalam negeri jangka pendek lainnya.
548	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN/UTANG
5481	Belanja Terkait Pendapatan Hibah

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
54811	Belanja Terkait Pendapatan Hibah
548111	Belanja Terkait Pendapatan Hibah Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya-biaya yang terkait pendapatan hibah baik hibah yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Biaya-biaya dimaksud antara lain: banking commission, fee dan sebagainya. Akun ini hanya digunakan pada Bagian Anggaran, Eselon I: 999.02 (Pengelolaan Hibah).
55	BELANJA SUBSIDI
551	BELANJA SUBSIDI PERUSAHAAN NEGARA
5511	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
55111	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
551111	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan Digunakan untuk pembayaran subsidi melalui lembaga keuangan misalnya subsidi bunga KPR.
5512	Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan – BBM
55121	Belanja Subsidi BBM
551211	Belanja Subsidi Avgas Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi avgas yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan avgas.
551212	Belanja Subsidi Avtur Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi avtur yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan avtur.
551213	Belanja Subsidi Premium Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi premium yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan premium.
551214	Belanja Subsidi Minyak Bakar Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak bakar yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan minyak bakar.
551215	Belanja Subsidi Minyak Solar Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak solar yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan minyak solar.
551216	Belanja Subsidi Minyak Diesel Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak diesel yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan minyak diesel.
551217	Belanja Subsidi Minyak Tanah Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak tanah yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan minyak tanah.
551218	Belanja Subsidi Elpiji Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak tanah yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan elpiji.
5513	Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan – Non BBM
55131	Belanja Subsidi Non-BBM – Harga/Biaya
551311	Belanja Subsidi Pangan Digunakan untuk pengeluaran subsidi selisih harga yang diberikan kepada BULOG atas penyaluran beras OPK kepada Keluarga Miskin dengan perhitungan berdasarkan selisih antara harga jual beras OPK dengan Harga Pokok Beras BULOG.
551312	Belanja Subsidi Listrik Digunakan untuk pengeluaran subsidi dalam rangka menutup defisit arus kas operasi PT. PLN (Persero). Subsidi ini diberikan akibat harga jual listrik yang ditentukan oleh Pemerintah lebih rendah dibandingkan biaya

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
	produksi listrik oleh PT. PLN (Persero).
551313	Belanja Subsidi Benih
	Digunakan untuk pengeluaran subsidi selisih harga benih yang diberikan kepada petani melalui BUMN Benih terhadap penjualan benih padi dan kedele dibanding dengan biaya produksinya.
551314	Belanja Subsidi Obat
	Digunakan untuk pengeluaran subsidi selisih kurs atas pembelian impor bahan baku obat yang digunakan untuk pembuatan obat-obatan generik, alat kesehatan dan Keluarga Berencana.
551315	Belanja Subsidi Gula
	Digunakan untuk pengeluaran subsidi harga yang diberikan kepada petani melalui Pabrik Gula atas selisih harga jual gula petani dengan provenue yang ditetapkan oleh Pemerintah.
551316	Belanja Subsidi Pupuk
	Digunakan untuk pengeluaran subsidi harga yang diberikan kepada petani melalui Pabrik Pupuk atas selisih harga jual pupuk dengan provenue yang ditetapkan oleh Pemerintah.
551317	Belanja Subsidi Perawatan Beras
	Cukup jelas.
551318	Belanja Subsidi Pengawasan Pupuk
	Cukup jelas.
551319	Belanja Subsidi Harga/Biaya Lainnya
	Digunakan untuk pengeluaran subsidi selain subsidi pupuk, subsidi gula, subsidi obat, subsidi benih, subsidi pangan dan subsidi listrik.
55132	Belanja Subsidi Non-BBM – Pajak
551321	Belanja Subsidi PPh-DTP
	Digunakan untuk menampung pengeluaran negara atas pembayaran PPh yang ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.
551323	Belanja Subsidi BM-DTP
	Digunakan untuk menampung pengeluaran negara atas pembayaran BM yang ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.
55133	Belanja Subsidi Non-BBM – Lainnya
551331	Belanja Subsidi Haji
	Digunakan untuk pengeluaran subsidi selisih kurs yang diberikan kepada jamaah haji terhadap perubahan kurs dibandingkan kurs dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah.
551332	Belanja Subsidi Kendaraan Bermotor
	Digunakan untuk pengeluaran subsidi bunga kredit yang diberikan kepada anggota lembaga tinggi negara (DPR, DPA, MA, BPK) serta para pejabat eselon dalam Pemerintahan untuk pengadaan kendaraan perorangan.
551339	Belanja Subsidi Lainnya
	Digunakan untuk pengeluaran subsidi lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
55134	Belanja Subsidi Non BBM - Harga/Biaya II
551341	Belanja Subsidi Minyak Goreng
	Subsidi harga minyak goreng, berupa PPN penjualan minyak goreng yang ditanggung pemerintah, untuk mengendalikan harga minyak goreng agar terjangkau masyarakat.
5514	Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan – PSO
55141	Belanja Subsidi dalam rangka PSO
551411	Belanja Subsidi PT KAI
	Digunakan untuk pengeluaran bantuan kepada PT. Kereta Api Indonesia.
551412	Belanja Subsidi PT PELNI

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk pengeluaran bantuan kepada PT. PELNI.
551413	Belanja Subsidi PT Pos Indonesia
	Digunakan untuk pengeluaran bantuan kepada PT. Pos Indonesia.
551414	Belanja Subsidi TVRI
	Digunakan untuk pengeluaran bantuan kepada TVRI.
551415	Belanja Subsidi BULOG
	Digunakan untuk pengeluaran bantuan kepada BULOG.
551419	Belanja Subsidi Dalam Rangka PSO Lainnya
	Digunakan untuk pengeluaran bantuan dalam rangka PSO lainnya.
552	BELANJA SUBSIDI PERUSAHAAN SWASTA
5521	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
55211	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
552111	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
55212	Belanja Subsidi – Bunga Kredit
552121	Belanja Subsidi Bunga KUT
	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Usaha Tani (KUT).
552122	Belanja Subsidi Bunga KOP PIR
	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Koperasi Anggota Perkebunan Inti Rakyat-Transmigrasi.
552123	Belanja Subsidi Bunga KOP
	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Koperasi (KKop).
552124	Belanja Subsidi Bunga KOP PRIM
	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA).
552125	Belanja Subsidi Bunga KPR
	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana.
552126	Belanja Subsidi Bunga Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi
	Digunakan untuk pengeluaran subsidi Bunga yang dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap Kredit Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi.
552127	Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Eks KLBI
	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap Program eks KLBI.
552128	Belanja Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)
	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap Program Biofuel (Revitalisasi Perkebunan).
552129	Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya
	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Program Lainnya.
55213	Belanja Subsidi Imbalan Jasa Peminjam dan Risk Sharing
552131	Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
	Kode akun ini digunakan untuk mencatat pembayaran subsidi imbalan jasa penjaminan KUR kepada lembaga

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
	penjaminan yang seharusnya dibayar oleh penerima KUR.
552132	Belanja Subsidi Risk Sharing KKP dan Energi
	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Klaim Resiko yang harus dibayar pemerintah kepada Perusahaan Penjaminan terhadap Penyaluran KKP (KKP).
55214	Belanja Subsidi Kredit Program II
552141	Belanja Subsidi Bunga Pengusaha NAD dan Nias
	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap Pemberian Pinjaman Kepada Pengusaha NAD dan Nias.
552142	Belanja Subsidi Kredit Sektor Peternakan
	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS).
552143	Belanja Subsidi Kredit Resi Gudang
	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap Subsidi Resi Gudang.
5522	Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan
55221	Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan
552211	Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan
	Digunakan untuk pengeluaran bantuan kepada lembaga non keuangan.
56	BELANJA HIBAH
561	BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH LUAR NEGERI
5611	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
56111	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
561111	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
	Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain.
562	BELANJA HIBAH KEPADA ORGANISASI INTERNASIONAL
5621	Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
56211	Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
562111	Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
	Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada organisasi internasional.
563	BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH
5631	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
56311	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
563111	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
	Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada pemerintah daerah.
56312	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah
563121	Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri
	Cukup jelas.
563122	Belanja Hibah Jasa Kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri
	Cukup jelas.
563123	Belanja Hibah Surat Berharga Kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri
	Cukup jelas.
564	BELANJA HIBAH KEPADA ORGANISASI DALAM NEGERI

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
5641	Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri
56411	Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri
564111	Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri
	Cukup jelas.
57	BELANJA BANTUAN SOSIAL
571	BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK REHABILITASI SOSIAL
5711	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial
57111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial
571111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang
	Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
571112	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa
	Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
572	BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK JAMINAN SOSIAL
5721	Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial
57211	Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial
572111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang
	Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang dimaksudkan untuk skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Asuransi kesejahteraan sosial ini diberikan dalam bentuk iuran oleh pemerintah.
572112	Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa
	Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang dimaksudkan untuk skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Asuransi kesejahteraan sosial ini diberikan dalam bentuk iuran oleh pemerintah.
573	BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBERDAYAAN SOSIAL
5731	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial
57311	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial
573111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang
	Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan Sosial diberikan melalui antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kemauan dan kemampuan; 2. Penggalan potensi dan sumber daya; 3. Penggalan nilai-nilai dasar; 4. Pemberian akses; dan/atau 5. Pemberian bantuan usaha.
573112	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa
	Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang diarahkan untuk menjadikan warga

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
	<p>negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan Sosial diberikan melalui antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kemauan dan kemampuan; 2. Penggalian potensi dan sumber daya; 3. Penggalian nilai-nilai dasar; 4. Pemberian akses; dan/atau 5. Pemberian bantuan usaha.
574	BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL
5741	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial
57411	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial
574111	<p>Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang</p> <p>Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. bantuan langsung; 2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau 3. penguatan kelembagaan. - Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak. - Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
574112	<p>Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa</p> <p>Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. bantuan langsung; 2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau 3. penguatan kelembagaan. - Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban , pembelaan, dan pemenuhan hak. - Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
575	BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN
5751	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan
57511	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan
575111	<p>Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang</p> <p>Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyuluhan dan bimbingan sosial - Pelayanan sosial; - Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; - Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; - Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
	- Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.
575112	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Barang/Jasa Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Penyuluhan dan bimbingan sosial - Pelayanan sosial; - Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; - Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; - Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau - Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.
576	BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA
5761	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana
57611	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana
576111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang Digunakan untuk belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan/mitigasi bencana, tangggap darurat dan rehabilitasi/rekonstruksi. Penanggulangan bencana dilaksanakan dalam bentuk antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; - Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan penampungan serta tempat hunian; - Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; - Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana; - Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; - Santunan duka cita; - Santunan kecacatan.
576112	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Barang/Jasa Digunakan untuk belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan/mitigasi bencana, tangggap darurat dan rehabilitasi/rekonstruksi. Penanggulangan bencana dilaksanakan dalam bentuk antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; - Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan penampungan serta tempat hunian; - Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; - Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana; - Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; - Santunan duka cita; - Santunan kecacatan.
58	BELANJA LAIN-LAIN
581	BELANJA LAIN-LAIN
5811	Belanja Lain-lain Dana Cadangan
58111	Belanja Lain-lain Cadangan I
581111	Belanja Cadangan Umum Digunakan untuk pengeluaran dalam rangka membentuk yang menggunakan dana cadangan umum.

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
581112	Belanja Cadangan Tanggap Darurat (Dana Kontijensi) Digunakan untuk pengeluaran yang sifatnya darurat. Bagian Anggaran 069 (BA Lain-lain).
581113	Belanja Cadangan Dana Reboisasi Digunakan untuk pengeluaran pembiayaan kegiatan dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana kehutanan.
581114	Belanja Cadangan Tunjangan Beras PNS/TNI/Polri Digunakan untuk pembayaran selisih harga beras PNS/TNI/POLRI bila terjadi kenaikan pembelian harga beras Pemerintah kepada BULOG.
581115	Belanja Cadangan Kenaikan Harga Tanah (Land Capping) Pengeluaran yang diberikan kepada Departemen Keuangan untuk membiayai kenaikan harga tanah pada saat pembebasan lahan yang digunakan untuk pembangunan jalan tol.
581116	Belanja Cadangan Risiko Perubahan Asumsi Makro Cukup jelas.
581117	Belanja Cadangan Stabilisasi Harga Pangan Cukup jelas.
581118	Belanja Cadangan Risiko Lifting Cukup jelas.
581119	Belanja Cadangan Lainnya Cukup jelas.
58112	Belanja Lain-lain Cadangan II
581121	Belanja Cadangan Fiskal Lainnya (Risiko Kenaikan TTL Listrik) Cukup jelas.
581122	Belanja Cadangan Beras Pemerintah Cukup jelas.
581123	Belanja Cadangan Benih Nasional Cukup jelas.
5812	Belanja Lain-lain Lembaga Non Kementerian
58121	Belanja Lain-lain Lembaga Non Kementerian
581211	Belanja Lain-lain Lembaga Non Kementerian Cukup jelas.
5813	Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN
58131	Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN
581311	Belanja Fee Pelayanan Bank/Pos Persepsi Cukup jelas.
581312	Jasa Surveyor Pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan survey yang dilakukan oleh pihak ketiga oleh Kementerian Negara / Lembaga tertentu yang khusus dilakukan untuk keperluan tugas pokok fungsinya termasuk proses pengalihan ilmu/pembelajaran pada SDM K/L ybs dalam rangka survey tersebut.
581313	Jasa Perbendaharaan Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran kepada PT Pos dan Giro atas layanan jasa yang telah diberikan dalam rangka kegiatan perbendaharaan (pengeluaran dan penerimaan anggaran) yang memakai fasilitas PT Pos dan Giro.
581314	Jasa Pelayanan Bank Operasional Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran kepada Bank Operasional atas layanan jasa yang telah diberikan dalam rangka kegiatan perbendaharaan (pengeluaran dan penerimaan anggaran) yang memakai

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
	fasilitas BO tersebut.
581315	Belanja Jasa Pelayanan Perbendaharaan Cukup jelas.
581316	Belanja Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog Cukup jelas.
581319	Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN Lainnya Cukup jelas.
5814	Belanja Lain-lain BUN
58141	Belanja Lain-lain BUN
581411	Belanja iuran ke Lembaga Internasional Digunakan untuk pembayaran iuran-uran keanggotaan RI dalam berbagai organisasi/Badan Internasional.
581412	Belanja Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua Cukup jelas.
581413	Belanja Tunggakan dan Klaim Pihak Ketiga Digunakan untuk pembayaran terhadap klaim dari pihak ketiga.
581414	Belanja Dana Penunjang (PHLN) Digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Pemda bersumber dari PHLN, Sesuai dengan KMK No. 35 Tahun 2002 tentang Tatacara Pemberian dan Penatausahaan PHLN kepada Pemda.
581415	Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN Digunakan untuk mencatat rugi selisih kurs terealisasi dalam pengelolaan rekening milik BUN.
581416	Belanja Penugasan PT SMI Cukup jelas.
581417	Belanja Kompensasi Kenaikan Harga BBM Pengeluaran yang digunakan untuk bantuan kepada masyarakat sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM.
581418	Belanja Konversi BBM ke BBG untuk Transportasi Umum Cukup jelas.
581419	Belanja Lain-lain BUN Lainnya Cukup jelas.
5815	Belanja Lain-lain Tanggap Darurat
58151	Belanja Lain-lain Tanggap Darurat
581511	Belanja Keperluan Mendesak/Tak Terduga Cukup jelas.
581512	Belanja Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Digunakan untuk pengeluaran dalam rangka tanggap darurat penanggulangan bencana.
5819	Belanja Lain-lain Lainnya
58191	Belanja Lain-lain Lainnya
581911	Belanja Pemilu Digunakan untuk pengeluaran pembiayaan kegiatan dalam rangka pemilu/sidang tahunan.
581919	Belanja Lain-lain Digunakan untuk pengeluaran belanja lainnya.

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
6	TRANSFER KE DAERAH
61	TRANSFER DANA BAGI HASIL
611	TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
6111	Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan
61111	Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan
611111	Transfer DBH PPh Pasal 21
	Pengeluaran negara atas penyaluran penerimaan PPh Pasal 21 yang merupakan bagian pendapatan Propinsi.
611112	Transfer DBH PPh Pasal 25/29 OP
	Pengeluaran negara atas penyaluran penerimaan PPh Pasal 21 yang merupakan bagian pendapatan Kabupaten/Kota.
6112	Transfer Dana bagi hasil PBB
61121	Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
611211	Transfer DBH PBB untuk Propinsi
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian propinsi sebesar 16,2 persen dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Propinsi.
611212	Transfer DBH PBB untuk Kabupaten/Kota
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian Kabupaten/Kota sebesar 64,8 persen dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota.
611213	Transfer DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian daerah untuk Biaya Pemungutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Propinsi.
611214	Transfer DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/Kota
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian daerah untuk Biaya Pemungutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota.
611215	Transfer DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dikembalikan Sama Rata ke Kabupaten/Kota
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian Pemerintah Pusat dan dibagikan kepada seluruh Kabupaten/Kota.
611216	Transfer DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dikembalikan sebagai Insentif PBB ke Kabupaten/Kota
	Cukup jelas.
612	TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
6121	Transfer DBH-SDA Minyak Bumi
61211	Transfer Dana Bagi Hasil Minyak Bumi
612111	Transfer DBH Minyak Bumi
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA minyak bumi yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Propinsi.
612112	Transfer DBH Minyak Bumi 0.5%
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA minyak bumi yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil.
612113	Tambahan Transfer DBH Minyak Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus
	Digunakan untuk pembayaran tambahan transfer DBH minyak bumi dalam rangka otonomi khusus NAD dan Papua.
6122	Transfer DBH-SDA Gas Bumi
61221	Transfer Dana Bagi Hasil Gas Bumi
612211	Transfer DBH Gas Bumi
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA gas alam yang merupakan bagian daerah dan dibagikan

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
	untuk Propinsi penghasil.
612212	Transfer DBH Gas Bumi 0.5%
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA gas alam yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil.
612213	Tambahan Transfer DBH Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus
	Digunakan untuk pembayaran tambahan transfer DBH gas bumi dalam rangka otonomi khusus NAD dan Papua.
6123	Transfer DBH-SDA Pertambangan Umum
61231	Transfer Dana Bagi Hasil-SDA Pertambangan Umum
612311	Transfer DBH Pertambangan Umum - Iuran Tetap
	Pengeluaran negara untuk penyaluran bagi hasil Iuran Tetap sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil.
612312	Transfer DBH Pertambangan Umum - Royalti
	Pengeluaran negara untuk penyaluran bagi hasil Royalti sebesar 64 % kepada Kabupaten/Kota Penghasil.
6124	Transfer DBH-SDA Pertambangan Panas Bumi
61241	Transfer Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi
612411	Transfer DBH Pertambangan Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah
	Pengeluaran negara untuk penyaluran bagi hasil Iuran Tetap sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil.
612412	Transfer DBH Pertambangan Panas Bumi - Iuran Tetap
	Pengeluaran negara untuk penyaluran bagi hasil Iuran Tetap sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil.
612413	Transfer DBH Pertambangan Panas Bumi - Iuran Produksi (Royalti)
	Pengeluaran negara untuk penyaluran bagi hasil Royalti sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil.
6125	Transfer DBH-SDA Kehutanan
61251	Transfer Dana Bagi Hasil Kehutanan
612511	Transfer DBH Kehutanan - IIUPH/IHPH
	Pengeluaran negara untuk penyaluran bagi hasil IHPH sebesar 16% kepada Propinsi penghasil.
612512	Transfer DBH Kehutanan - PSDH
	Pengeluaran negara untuk penyaluran bagi hasil IHPH sebesar 64% kepada Kabupaten/Kota penghasil.
612513	Transfer DBH Kehutanan - Dana Reboisasi
	Pengeluaran DAK yang bersumber dari dana reboisasi dan digunakan untuk kabupaten/kota.
6126	Transfer DBH Perikanan
61261	Transfer Dana Bagi Hasil Perikanan
612611	Transfer DBH Perikanan
	Pengeluaran negara untuk penyaluran bagi hasil perikanan sebesar 80% secara merata kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
613	TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
6131	Transfer Dana Bagi Hasil Cukai
61311	Transfer Dana Bagi Hasil Cukai
613111	Transfer DBH Cukai Hasil Tembakau
	Digunakan untuk pembayaran transfer DBH Cukai Hasil Tembakau untuk Propinsi sesuai dengan UU tentang APBN dan PP tentang Dana Perimbangan.
62	TRANSFER DANA ALOKASI UMUM
621	TRANSFER DANA ALOKASI UMUM
6211	Transfer Dana Alokasi Umum
62111	Transfer Dana Alokasi Umum
621111	Transfer DAU

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
	Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Propinsi.
621114	Transfer Koreksi DAU
	Cukup jelas.
63	TRANSFER DANA ALOKASI KHUSUS
631	TRANSFER DANA ALOKASI KHUSUS
6311	Transfer Dana Alokasi Khusus
63111	Transfer Dana Alokasi Khusus
631111	Transfer DAK
	Pengeluaran negara untuk penyaluran DAK.
631113	Transfer Koreksi DAK
	Cukup jelas.
64	TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS
641	TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS
6411	Transfer Dana Otonomi Khusus Aceh
64111	Transfer Dana Otonomi Khusus Aceh
641111	Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh
	Pengeluaran untuk pelaksanaan otonomi khusus untuk NAD.
6412	Transfer Dana Otonomi Khusus Papua
64121	Transfer Dana Otonomi Khusus Papua
641211	Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua
	Pengeluaran untuk pelaksanaan otonomi khusus untuk Papua, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001.
641212	Transfer Dana Tambahan Infrastruktur Papua
	Pengeluaran untuk dana otonomi khusus tambahan infrastruktur untuk Papua.
6413	Transfer Dana Otonomi Khusus Papua Barat
64131	Transfer Dana Otonomi Khusus Papua Barat
641311	Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat
	Pengeluaran untuk pelaksanaan otonomi khusus untuk Papua Barat.
641312	Transfer Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat
	Pengeluaran untuk dana otonomi khusus tambahan infrastruktur untuk Papua Barat.
65	TRANSFER DANA PENYESUAIAN
651	TRANSFER DANA PENYESUAIAN I
6511	Transfer Dana Penyesuaian I
65111	Transfer Dana Penyesuaian I
651119	Transfer Dana Penyesuaian Lainnya
	Transfer Dana Penyesuaian lainnya.
652	TRANSFER DANA PENYESUAIAN II
6521	Transfer Dana Penyesuaian II
65211	Transfer Dana Penyesuaian II
652111	Transfer Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah
	Cukup jelas.
652112	Transfer Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
	Pengeluaran negara untuk penyaluran dana untuk Guru PNSD dan Tambahan Tunjangan Guru PNSD.
652113	Transfer Dana Kurang Bayar Dana Alokasi Khusus (DAK)

PENJELASAN PENGGUNAAN KODE AKUN

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

AKUN	PENJELASAN
	Digunakan untuk membayar selisih perhitungan DAK (Kurang Bayar) tahun anggaran yang lalu, sebesar jumlah utang/piutang transfer ke daerah yang disajikan pada neraca.
652114	Transfer Dana Kurang Bayar Dana Penyesuaian infrastruktur Jalan dan Lainnya (DPIL) Cukup jelas.
652115	Transfer Dana Insentif Daerah (DID) Digunakan untuk membayar transfer dana insentif daerah.
652116	Transfer Dana Kurang Bayar Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana (DISP) Digunakan untuk memperhitungkan kurang dan lebih bayar Transfer Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana (DISP), sebesar jumlah utang/piutang transfer ke daerah yang disajikan pada neraca.
652117	Transfer Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD) Cukup jelas.
652118	Transfer Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) Cukup jelas.
653	TRANSFER DANA PENYESUAIAN III
6531	Transfer Dana Penyesuaian III
65311	Transfer Dana Penyesuaian III
653111	Transfer Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG) Cukup jelas.
653112	Transfer Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Cukup jelas.
653113	Transfer Dana Penyesuaian Insfrastruktur Daerah (DPID) Cukup jelas.
653114	Transfer Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Cukup jelas.
653115	Transfer Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) Cukup jelas.

DIREKTUR JENDERAL,

AGUS SUPRIJANTO
NIP 19530814 197507 1 001

MAPPING PERUBAHAN KODEFIKASI DAN URAIAN AKUN

TA 2011		TA 2012		KETERANGAN
522111	Belanja Langganan Daya dan Jasa	522111	Belanja Langganan Listrik	KODE BARU, URAIAN BARU
522111	Belanja Langganan Daya dan Jasa	522112	Belanja Langganan Telepon	KODE BARU, URAIAN BARU
522111	Belanja Langganan Daya dan Jasa	522113	Belanja Langganan Air	KODE BARU, URAIAN BARU
522111	Belanja Langganan Daya dan Jasa	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	KODE BARU, URAIAN BARU
522112	Belanja Jasa Pos dan Giro	522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	KODE BARU, URAIAN LAMA
522113	Belanja Jasa Konsultan	522131	Belanja Jasa Konsultan	KODE BARU, URAIAN LAMA
522114	Belanja Sewa	522141	Belanja Sewa	KODE BARU, URAIAN LAMA
522115	Belanja Jasa Profesi	522151	Belanja Jasa Profesi	KODE BARU, URAIAN LAMA
522119	Belanja Jasa Lainnya	522191	Belanja Jasa Lainnya	KODE BARU, URAIAN LAMA
581	BELANJA LAIN-LAIN	581	BELANJA LAIN-LAIN	
5811	Belanja Lain-lain	5811	Belanja Lain-lain Dana Cadangan	URAIAN BARU
58111	Belanja Rekonstruksi	58111	Belanja Lain-lain Dana Cadangan	URAIAN BARU
581111	Belanja untuk Rekonstruksi Aceh	581512	Belanja Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	KODE BARU, URAIAN BARU
58112	Belanja Lain-lain I			
581121	Belanja Kerjasama Teknis Internasional	581411	Belanja Iuran ke Lembaga Internasional	KODE BARU, URAIAN BARU
581122	Belanja Pengeluaran Tak Terduga	581511	Belanja Keperluan Mendesak/Tak Terduga	KODE BARU, URAIAN BARU
581123	Belanja Cadangan Umum	581111	Belanja Cadangan Umum	KODE BARU, URAIAN LAMA
581124	Belanja Pemilu tahunan	581911	Belanja Pemilu	KODE BARU, URAIAN BARU
581125	Belanja Cadangan tunjangan beras PNS/TNI/Polri	581114	Belanja Cadangan Tunjangan Beras PNS/TNI/Polri	KODE BARU, URAIAN LAMA
581126	Belanja Cadangan dana reboisasi	581113	Belanja Cadangan Dana Reboisasi	KODE BARU, URAIAN LAMA
581127	Belanja Tunggakan dan klaim pihak ketiga	581413	Belanja Tunggakan dan Klaim Pihak Ketiga	KODE BARU, URAIAN LAMA
581128	Belanja Dana Cadangan Tanggap Darurat (Dana Kontijensi)	581112	Belanja Dana Cadangan Tanggap Darurat (Dana Kontijensi)	KODE BARU, URAIAN LAMA
58113	Belanja Lain-lain II			
581133	Belanja Dana Penunjang (PHLN)	581414	Belanja Dana Penunjang (PHLN)	KODE BARU, URAIAN LAMA
581135	Belanja karena rugi selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUN	581415	Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	KODE BARU, URAIAN LAMA
581136	Jasa Surveyor	581312	Jasa Surveyor	KODE BARU, URAIAN LAMA

TA 2011		TA 2012		KETERANGAN
581137	Jasa Perbendaharaan	581313	Jasa Perbendaharaan	KODE BARU, URAIAN LAMA
581138	Jasa Pelayanan Bank Operasional	581314	Jasa Pelayanan Bank Operasional	KODE BARU, URAIAN LAMA
58114	Belanja Lain-lain III			
581144	Belanja Kompensasi Kenaikan Harga BBM	581417	Belanja Kompensasi Kenaikan Harga BBM	KODE BARU, URAIAN LAMA
581145	Dana Cadangan Resiko Kenaikan Harga Tanah	581115	Belanja Cadangan Kenaikan Harga Tanah (Land Capping)	KODE BARU, URAIAN BARU
581149	Belanja lain-lain	581919	Belanja lain-lain	KODE BARU, URAIAN LAMA
61	TRANSFER DANA PERIMBANGAN	61	TRANSFER DANA BAGI HASIL	URAIAN BARU
611	TRANSFER DANA BAGI HASIL	611	TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK	URAIAN BARU
6111	Transfer Dana Bagi Hasil Pajak	6111	Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan	URAIAN BARU
61111	Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan	61111	Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan	TETAP
611111	Transfer DBH PPh psl 21	611111	Transfer DBH PPh psl 21	TETAP
611112	Transfer DBH PPh psl 25/29 OP	611112	Transfer DBH PPh psl 25/29 OP	TETAP
61112	Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	61121	Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	KODE BARU, URAIAN LAMA
611121	Transfer DBH PBB untuk Propinsi	611211	Transfer DBH PBB untuk Propinsi	KODE BARU, URAIAN LAMA
611122	Transfer DBH PBB untuk Kabupaten/Kota	611212	Transfer DBH PBB untuk Kabupaten/Kota	KODE BARU, URAIAN LAMA
611123	Transfer DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi	611213	Transfer DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi	KODE BARU, URAIAN LAMA
611124	Transfer DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kab./Kota	611214	Transfer DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kab./Kota	KODE BARU, URAIAN LAMA
611125	Transfer DBH bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Kabupaten/Kota	611215	Transfer DBH bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan sama rata ke Kabupaten/Kota	KODE BARU, URAIAN LAMA
		611216	Transfer DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan sebagai insentif PBB ke Kabupaten/Kota	AKUN BARU
6112	Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	6121	Transfer DBH-SDA Minyak Bumi	KODE BARU, URAIAN BARU
61121	Transfer Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	61211	Transfer Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	KODE BARU, URAIAN LAMA
611211	Transfer DBH Minyak Bumi	612111	Transfer DBH Minyak Bumi	KODE BARU, URAIAN LAMA
611212	Transfer DBH Minyak Bumi 0.5%	612112	Transfer DBH Minyak Bumi 0.5%	KODE BARU, URAIAN LAMA
611214	Tambahan Transfer DBH Minyak Bumi dalam rangka Otonomi Khusus	612113	Tambahan Transfer DBH Minyak Bumi dalam rangka Otonomi Khusus	KODE BARU, URAIAN LAMA
		6122	Transfer DBH-SDA Gas Bumi	KODE BARU, URAIAN BARU
61122	Transfer Dana Bagi Hasil Gas Bumi	61221	Transfer Dana Bagi Hasil Gas Bumi	KODE BARU, URAIAN LAMA
611221	Transfer DBH Gas Bumi	612211	Transfer DBH Gas Bumi	KODE BARU, URAIAN LAMA
611222	Transfer DBH Gas Bumi 0.5%	612212	Transfer DBH Gas Bumi 0.5%	KODE BARU, URAIAN LAMA

TA 2011		TA 2012		KETERANGAN
611224	Tambahan Transfer DBH Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus	612213	Tambahan Transfer DBH Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus	KODE BARU, URAIAN LAMA
		6123	Transfer DBH-SDA Pertambangan Umum	KODE BARU, URAIAN BARU
61123	Transfer Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum	61231	Transfer Dana Bagi Hasil-SDA Pertambangan Umum	KODE BARU, URAIAN LAMA
611231	Transfer DBH Pertambangan Umum - Iuran Tetap	612311	Transfer DBH Pertambangan Umum - Iuran Tetap	KODE BARU, URAIAN LAMA
611232	Transfer DBH Pertambangan Umum - Royalti	612312	Transfer DBH Pertambangan Umum - Royalti	KODE BARU, URAIAN LAMA
		6124	Transfer DBH-SDA Pertambangan Panas Bumi	KODE BARU, URAIAN BARU
61124	Transfer Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi	61241	Transfer Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi	
611241	Transfer DBH Pertambangan Panas Bumi Setoran Bagian Pemerintah	612411	Transfer DBH Pertambangan Panas Bumi Setoran Bagian Pemerintah	KODE BARU, URAIAN LAMA
611242	Transfer DBH Pertambangan Panas Bumi - Iuran Tetap	612412	Transfer DBH Pertambangan Panas Bumi - Iuran Tetap	KODE BARU, URAIAN LAMA
611243	Transfer DBH Pertambangan Panas Bumi - Iuran Produksi (Royalti)	612413	Transfer DBH Pertambangan Panas Bumi - Iuran Produksi (Royalti)	KODE BARU, URAIAN LAMA
61125	Transfer Dana bagi Hasil Kehutanan	61251	Transfer Dana Bagi Hasil Kehutanan	KODE BARU, URAIAN LAMA
611251	Transfer DBH Kehutanan - IIUPH/IHPH	612511	Transfer DBH Kehutanan - IIUPH/IHPH	KODE BARU, URAIAN LAMA
611252	Transfer DBH Kehutanan - PSDH	612512	Transfer DBH Kehutanan - PSDH	KODE BARU, URAIAN LAMA
611256	Transfer DBH Kehutanan - Dana Reboisasi	612513	Transfer DBH Kehutanan - Dana Reboisasi	KODE BARU, URAIAN LAMA
61126	Transfer Dana Bagi Hasil Perikanan	61261	Transfer Dana Bagi Hasil Perikanan	KODE BARU, URAIAN LAMA
611261	Transfer DBH Perikanan	612611	Transfer DBH Perikanan	KODE BARU, URAIAN LAMA
6113	Transfer Dana Bagi Hasil Cukai	6131	Transfer Dana Bagi Hasil Cukai	KODE BARU, URAIAN LAMA
61131	Transfer Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	61311	Transfer Dana Bagi Hasil Cukai	KODE BARU, URAIAN BARU
611311	Transfer DBH Cukai Hasil Tembakau	613111	Transfer DBH Cukai Hasil Tembakau	KODE BARU, URAIAN LAMA
612	TRANSFER DANA ALOKASI UMUM	621	TRANSFER DANA ALOKASI UMUM	KODE BARU, URAIAN LAMA
6121	Transfer Dana Alokasi Umum	6211	Transfer Dana Alokasi Umum	KODE BARU, URAIAN LAMA
61211	Transfer Dana Alokasi Umum	62111	Transfer Dana Alokasi Umum	KODE BARU, URAIAN LAMA
612111	Transfer DAU	621111	Transfer DAU	KODE BARU, URAIAN LAMA
612114	Transfer Koreksi DAU	621114	Transfer Koreksi DAU	KODE BARU, URAIAN LAMA
613	TRANSFER DANA ALOKASI KHUSUS	631	TRANSFER DANA ALOKASI KHUSUS	KODE BARU, URAIAN LAMA
6131	Transfer Dana Alokasi Khusus	6311	Transfer Dana Alokasi Khusus	KODE BARU, URAIAN LAMA
61311	Transfer DAK Bidang Pendidikan	63111	Transfer Dana Alokasi Khusus	KODE BARU, URAIAN LAMA
613111	Transfer DAK	631111	Transfer DAK	KODE BARU, URAIAN LAMA

TA 2011		TA 2012		KETERANGAN
613114	Transfer Koreksi DAK	631113	Transfer Koreksi DAK	KODE BARU, URAIAN LAMA
621	TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS	641	TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS	KODE BARU, URAIAN LAMA
6211	Transfer Dana Otonomi Khusus	6411	Transfer Dana Otonomi Khusus Aceh	KODE BARU, URAIAN LAMA
62111	Transfer Dana Otonomi Khusus	64111	Transfer Dana Otonomi Khusus Aceh	KODE BARU, URAIAN LAMA
621111	Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	641211	Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	KODE BARU, URAIAN LAMA
621112	Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi NAD	641111	Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	KODE BARU, URAIAN LAMA
621113	Transfer Dana Tambahan Infrastruktur Papua	641212	Transfer Dana Tambahan Infrastruktur Papua	KODE BARU, URAIAN LAMA
621114	Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	641311	Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	KODE BARU, URAIAN LAMA
621115	Transfer Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	641312	Transfer Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	KODE BARU, URAIAN LAMA
622	TRANSFER DANA PENYESUAIAN	651	TRANSFER DANA PENYESUAIAN I	KODE BARU, URAIAN LAMA
6221	Transfer Dana Penyesuaian	6511	Transfer Dana Penyesuaian I	KODE BARU, URAIAN LAMA
62211	Transfer Dana Penyesuaian	65111	Transfer Dana Penyesuaian I	KODE BARU, URAIAN LAMA
622119	Transfer Dana Penyesuaian Lainnya	651119	Transfer Dana Penyesuaian Lainnya	KODE BARU, URAIAN LAMA
62212	Transfer Dana Penyesuaian II	65211	Transfer Dana Penyesuaian II	KODE BARU, URAIAN LAMA
622121	Transfer Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah	652111	Transfer Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah	KODE BARU, URAIAN LAMA
622122	Transfer Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	652112	Transfer Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	KODE BARU, URAIAN LAMA
622123	Transfer Dana Kurang Bayar Dana Alokasi Khusus (DAK)	652113	Transfer Dana Kurang Bayar Dana Alokasi Khusus	KODE BARU, URAIAN LAMA
622124	Transfer Dana Kurang Bayar Dana Penyesuaian infrastruktur Jalan dan Lainnya (DPIL)	652114	Transfer Dana Kurang Bayar Dana Penyesuaian infrastruktur Jalan dan Lainnya (DPIL)	KODE BARU, URAIAN LAMA
622125	Transfer Dana Insentif Daerah (DID)	652115	Transfer Dana Insentif Daerah (DID)	KODE BARU, URAIAN LAMA
622126	Transfer Dana Kurang Bayar Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana (DISP)	652116	Transfer Dana Kurang Bayar Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana (DISP)	KODE BARU, URAIAN LAMA
622127	Transfer Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD)	652117	Transfer Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD)	KODE BARU, URAIAN LAMA
622128	Transfer Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP)	652118	Transfer Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP)	KODE BARU, URAIAN LAMA
62213	Transfer Dana Penyesuaian III	65311	Transfer Dana Penyesuaian III	KODE BARU, URAIAN LAMA
622131	Transfer Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	653111	Transfer Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	KODE BARU, URAIAN LAMA
622132	Transfer Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	653112	Transfer Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	KODE BARU, URAIAN LAMA
622133	Transfer Dana Penyesuaian Insfrastruktur Daerah (DPID)	653113	Transfer Dana Penyesuaian Insfrastruktur Daerah (DPID)	KODE BARU, URAIAN LAMA

TA 2011		TA 2012		KETERANGAN
622134	Transfer Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID)	653114	Transfer Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID)	KODE BARU, URAIAN LAMA
		653115	Transfer Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)	AKUN BARU

DIREKTUR JENDERAL

AGUS SUPRIJANTO
NIP 19530814 197507 1 001

RESTRUKTURISASI AKUN PENDAPATAN DARI PENGELOLAAN BMN DAN PENDAPATAN DARI PENJUALAN

TA 2011		TA 2012	
4231	Pendapatan Penjualan dan Sewa	4231	Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta pendapatan dari penjualan
42312	Pendapatan Penjualan Aset	42312	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN
423121	Pendapatan Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	423121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan
423122	Pendapatan Penjualan Kendaraan Bermotor	423122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
423123	Pendapatan Penjualan Sewa Beli	423123	Pendapatan Penjualan Sewa Beli
423124	Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing	423124	Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing/Cina
423125		423125	Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan
423126		423126	Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin
423127		423127	Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan
423129	Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan	423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
42314	Pendapatan Sewa	42314	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN
423141	Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
423142	Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang	423142	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin
423143	Pendapatan Sewa Benda-benda Bergerak	423143	Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan
423144		423144	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan
423145		423145	Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin
423146		423146	Pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi dan Jaringan
423147		423147	Pendapatan dari Bangun, Guna, Serah (BGS)
423148		423148	Pendapatan dari Bangun, Serah, Guna (BSG)
423149	Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya	423149	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya

DIREKTUR JENDERAL,

AGUS SUPRIJANTO
 NIP 19530814 197507 1 001

RESTRUKTURISASI AKUN BELANJA BANTUAN SOSIAL

TA 2011		TA 2012	
57	BELANJA BANTUAN SOSIAL	57	BELANJA BANTUAN SOSIAL
571	BELANJA BANTUAN KOMPENSASI SOSIAL	571	BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK REHABILITASI SOSIAL
5711	Belanja Bantuan Kompensasi Sosial	5711	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial
57111	Belanja Bantuan Kompensasi Sosial	57111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial
571111	Belanja Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM	571111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial dalam bentuk uang
		571112	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial dalam bentuk barang/jasa
572	BELANJA BANTUAN SOSIAL LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PERIBADATAN	572	BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK JAMINAN SOSIAL
5721	Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan	5721	Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial
57211	Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan	57211	Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial
572111	Belanja Bantuan Langsung (Block Grant) Sekolah/Lembaga/Guru	572111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial dalam bentuk uang
572112	Belanja Bantuan Imbal Swadaya Sekolah/Lembaga	572112	Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial dalam bentuk barang/jasa
572113	Belanja Bantuan Beasiswa		
5722	Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan		
57221	Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan		
572211	Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan		
573	BELANJA LEMBAGA SOSIAL LAINNYA	573	BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBERDAYAAN SOSIAL
5731	Belanja Lembaga Sosial Lainnya	5731	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial
57311	Belanja Lembaga Sosial Lainnya	57311	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial
573119	Belanja Lembaga Sosial Lainnya	573111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial dalam bentuk uang
		573112	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial dalam bentuk barang/jasa

TA 2011		TA 2012	
		574	BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL
		5741	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial
		57411	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial
		574111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial dalam bentuk uang
		574112	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial dalam bentuk barang/jasa
		575	BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN
		5751	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan
		57511	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan
		575111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam bentuk uang
		575112	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam bentuk barang/jasa
		576	BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA
		5761	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana
		57611	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana
		576111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana dalam bentuk uang
		576112	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana dalam bentuk barang/jasa

DIREKTUR JENDERAL,

AGUS SUPRIJANTO
NIP 19530814 197507 1 001

PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN URAIAN/PENJELASAN AKUN

TA 2011		TA 2012	
423762	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pembagian PBB/BPHTB oleh BO III PBB/BPHTB	423762	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pembagian PBB oleh BO III PBB
423913	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL	423913	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL
423917	Pengembalian Transfer ke Daerah TAYL	423917	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah TAYL
423941	Pendapatan dari Selisih kurs dalam pengelolaan RKUN	423941	Pendapatan dari Selisih Kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUN
43111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri	43111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Terencana
431111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Perorangan	431111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana Perorangan
431112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Lembaga/Badan Usaha	431112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana Lembaga/Badan Usaha
431119	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Lainnya	431119	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana Lainnya
43112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Non Kas	43112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga
431121	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Berupa Barang (Transaksi Non Kas)	431121	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Barang
431122	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Berupa Jasa (Transaksi Non Kas)	431122	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Jasa
43113	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung	43113	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Uang
431131	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung - Perorangan	431131	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Perorangan
431132	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung - Lembaga/Badan Usaha	431132	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Lembaga/Badan Usaha
431133	Pendapatan Dalam Negeri Langsung - Pemerintah Daerah	431133	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Pemerintah Daerah
431139	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Lainnya	431139	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Lainnya
43121	Pendapatan Hibah Luar Negeri	43121	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana
431211	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Perorangan	431211	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Perorangan
431212	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Bilateral	431212	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Bilateral
431213	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Multilateral	431213	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Multilateral
431219	Pendapatan Hibah Luar Negeri Lainnya	431219	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Lainnya
43122	Pendapatan Hibah Luar Negeri Non Kas	43122	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga
431221	Pendapatan Hibah Luar Negeri Berupa Barang (Transaksi Non Kas)	431221	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Barang

TA 2011		TA 2012	
431222	Pendapatan Hibah Luar Negeri Berupa Jasa (Transaksi Non Kas)	431222	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Jasa
43123	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung	43123	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang
431231	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung - Perorangan	431231	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Perorangan
431232	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung - Bilateral	431232	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Bilateral
431233	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung - Multilateral	431233	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Multilateral
431239	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Lainnya	431239	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Lainnya
511245	Belanja Tunjangan Cacat dan Santunan TNI/Polri	511245	Belanja Santunan Cacat TNI
Penjelasan	Tunjangan yang diberikan kepada anggota TNI/Polri yang mengalami cacat dalam menjalankan tugas terhitung mulai 1 Januari 2008. Sesuai dengan PP No 56 Tahun 2007 tanggal 9 Oktober 2007 tentang santunan dan tunjangan cacat Prajurit TNI/POLRI.	Penjelasan	Santunan yang diberikan kepada anggota TNI yang mengalami cacat dalam menjalankan tugas sesuai dengan PP Nomor 56 Tahun 2007 tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit TNI.
513211	Belanja Askes PNS	513211	Belanja Askes PNS
Penjelasan	Digunakan untuk pembayaran belanja Askes PNS.	Penjelasan	Digunakan untuk pembayaran iuran Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan Asuransi Kesehatan PNS.
513221	Belanja Askes Penerima Pensiun	513221	Belanja Askes Penerima Pensiun
Penjelasan	Digunakan untuk pembayaran belanja Askes Penerima Pensiun.	Penjelasan	Digunakan untuk pembayaran iuran Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Penerima Pensiun.
513251	Belanja Askes Veteran	513251	Belanja Askes Veteran
Penjelasan	Digunakan untuk pembayaran belanja Askes Veteran.	Penjelasan	Digunakan untuk pembayaran iuran kesehatan dalam rangka penyelenggaraan asuransi kesehatan veteran Penerima Tunjangan Veteran yang ditanggung pemerintah pusat.
513311	Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran Non Tuvet	513311	Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran Non Tuvet
Penjelasan	Digunakan untuk pembayaran belanja tunjangan kesehatan veteran non tuvet.	Penjelasan	Digunakan untuk pembayaran iuran kesehatan dalam rangka penyelenggaraan asuransi kesehatan veteran Non Tuvet yang ditanggung pemerintah pusat.

TA 2011		TA 2012	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	521111	Belanja Keperluan Perkantoran
Penjelasan	<p>Pengeluaran untuk membiayai keperluan sehari-hari perkantoran yang secara langsung menunjang kegiatan operasional Kementerian negara/ lembaga terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yaitu pengadaan barang yang habis dipakai antara lain pembelian alat-alat tulis, barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, biaya minum/makanan kecil untuk rapat, biaya penerimaan tamu. - Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah pegawai antara lain biaya satpam/pengaman kantor, cleaning service, sopir (yang dipekerjakan secara kontraktual) telex, internet, komunikasi khusus diplomat, pengurusan penggantian sertifikat tanah, pembayaran PBB. - Pengeluaran untuk membiayai pengadaan/penggantian inventaris yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kantor/satker di bawah nilai kapitalisasi. 	Penjelasan	<p>Pengeluaran untuk membiayai keperluan sehari-hari perkantoran yang secara langsung menunjang kegiatan operasional Kementerian negara/ lembaga terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yaitu pengadaan barang yang habis dipakai antara lain pembelian alat-alat tulis, barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, biaya minum/makanan kecil untuk rapat, biaya penerimaan tamu. - Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah pegawai antara lain biaya satpam/pengaman kantor, cleaning service, sopir, tenaga lepas (yang dipekerjakan secara kontraktual), telex, internet, komunikasi khusus diplomat, pengurusan penggantian sertifikat tanah yang hilang, pembayaran PBB. - Pengeluaran untuk membiayai pengadaan/penggantian inventaris yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kantor/satker di bawah nilai kapitalisasi. - Pembelian buku cek/buku giro bilyet. - Pembelian meterai.
521115	Honor Operasional Satuan Kerja	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
Penjelasan	<p>Honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan operasional kegiatan satuan kerja seperti, honor pejabat kuasa pengguna anggaran, honor pejabat pembuat komitmen, honor pejabat penguji SPP dan penanda tangan SPM, Honor Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka, Honor Staf Pengelola Keuangan, Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pemeriksa Penerima Barang/Jasa, Honor Pengelola PNBPN (honor atasan langsung, bendahara dan sekretariat), honor pengelola satuan kerja (yang mengelola gaji pada Kementerian Pertahanan).</p>	Penjelasan	<p>Honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan operasional kegiatan satuan kerja seperti, honor pejabat kuasa pengguna anggaran, honor pejabat pembuat komitmen, honor pejabat penguji SPP dan penanda tangan SPM, Honor Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka, Honor Staf Pengelola Keuangan, Honor Pengelola PNBPN (honor atasan langsung, bendahara dan sekretariat), honor pengelola satuan kerja (yang mengelola gaji pada Kementerian Pertahanan), honor Tim SAI (Pengelola SAK dan SIMAKBMN).</p> <p>Honor Operasional Satuan Kerja merupakan honor yang menunjang kegiatan operasional yang bersangkutan dan pembayaran honoronya dilakukan secara terus menerus dari awal sampai dengan akhir tahun anggaran.</p>

TA 2011		TA 2012	
521213	Honor Output Kegiatan	521213	Belanja Honor Output Kegiatan
Penjelasan	Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan output seperti : honor untuk Pelaksana Kegiatan Penelitian, honor penyuluh non PNS, Honor Tim Pelaksana Kegiatan (pengarah, penanggung jawab, koordinator, ketua, sekretaris, anggota dan staf sekretariat).	Penjelasan	Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan output seperti : honor untuk Pelaksana Kegiatan Penelitian, honor penyuluh non PNS, Honor Tim Pelaksana Kegiatan (pengarah, penanggung jawab, koordinator, ketua, sekretaris, anggota dan staf sekretariat), Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pemeriksa Penerima Barang/Jasa, untuk pengadaan yang tidak menghasilkan Aset Tetap/Aset Lainnya. Honor Output Kegiatan dapat digunakan untuk biaya honor yang timbul sehubungan dengan/dalam rangka penyerahan barang kepada masyarakat. Honor Output Kegiatan merupakan honor yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang insidental dan dapat dibayarkan tidak terus menerus dalam satu tahun.
522113	Belanja Jasa Konsultan	522131	Belanja Jasa Konsultan
Penjelasan	Digunakan untuk pembayaran jasa konsultan secara kontraktual termasuk jasa pengacara.	Penjelasan	Digunakan untuk pembayaran jasa konsultan secara kontraktual termasuk jasa pengacara yang outputnya tidak menghasilkan Aset Lainnya.
536111	Belanja Modal Fisik Lainnya	536111	Belanja Modal Lainnya
Penjelasan	Pengeluaran untuk memperoleh modal fisik lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan belanja modal non fisik sampai siap pakai. Termasuk dalam belanja modal ini : kontrak sewa beli (leasehold), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian , barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum serta hewan ternak selain untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat, buku-buku dan jurnal ilmiah.	Penjelasan	Pengeluaran untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Pengeluaran untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya sampai dengan siap digunakan. Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pengadaan software, pengembangan website, pengadaan lisensi yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun baik secara swakelola maupun dikontrakkan kepada Pihak Ketiga. Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pembangunan aset tetap renovasi yang akan diserahkan kepada entitas lain dan masih di lingkungan pemerintah pusat. Untuk Aset Tetap Renovasi yang nantinya akan diserahkan kepada entitas lain berupa Gedung dan Bangunan mengikuti ketentuan batasan minimal kapitalisasi. Termasuk dalam belanja modal lainnya : pengadaan/pembelian barang-barang kesenian, dan koleksi perpustakaan.

TA 2011		TA 2012	
536121	Belanja Penambahan Nilai Fisik Lainnya	536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya
Penjelasan	Belanja Modal setelah perolehan Aset tetap lainnya yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja. Dan memenuhi batasan minimum kapitalisasi sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur batasan minimum kapitalisasi.	Penjelasan	Belanja Modal setelah perolehan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja. Untuk penambahan nilai Aset Tetap Renovasi yang nantinya akan diserahkan kepada entitas lain berupa Gedung dan Bangunan mengikuti ketentuan batasan minimal kapitalisasi.
551321	Belanja Subsidi PPh	551321	Belanja Subsidi PPh-DTP
Penjelasan	Digunakan untuk menampung pengeluaran negara atas pembayaran PPh yang ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.	Penjelasan	Digunakan untuk menampung pengeluaran negara atas pembayaran PPh yang ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.
551323	Belanja Subsidi BM	551323	Belanja Subsidi BM-DTP
Penjelasan	Digunakan untuk menampung pengeluaran negara atas pembayaran BM yang ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.	Penjelasan	Digunakan untuk menampung pengeluaran negara atas pembayaran BM yang ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.
552131	Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjaminan	552131	Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
Penjelasan	Kode akun ini digunakan untuk mencatat pembayaran subsidi imbalan jasa penjaminan KUR kepada lembaga penjaminan yang seharusnya dibayar oleh penerima KUR.	Penjelasan	Kode akun ini digunakan untuk mencatat pembayaran subsidi imbalan jasa penjaminan KUR kepada lembaga penjaminan yang seharusnya dibayar oleh penerima KUR.

DIREKTUR JENDERAL,

AGUS SUPRIJANTO
NIP 19530814 197507 1 001

AKUN YANG TIDAK DIGUNAKAN MULAI TAHUN ANGGARAN 2012

Akun	Uraian
411231	Pendapatan PPN Dalam Negeri Ditanggung Pemerintah
411232	Pendapatan PPN Impor Ditanggung Pemerintah
411239	Pendapatan PPN Lainnya Ditanggung Pemerintah
411632	Pendapatan Bunga Penagihan PPN Ditanggung Pemerintah
423919	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL
511186	Belanja Tunjangan Kewanitaan PNS TNI/Polri
521311	Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi
521321	Belanja Barang Penunjang Kegiatan Tugas Pembantuan (TP)
521411	Belanja Barang Fisik Lain Tugas Pembantuan (TP)
522211	Belanja Jasa Untuk Transaksi Non Kas
551322	Belanja Subsidi PPN-DTP
581131	Belanja Biaya/Upah Pungut PBB untuk DJP
581132	Belanja KONI
581141	Belanja TVRI
581142	Belanja RRI
581143	Belanja Pengembalian Penerimaan Hibah Karena Pengeluaran Ineligible
611113	Transfer DBH PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi
611114	Transfer DBH PPh psl 25/29 OP untuk Kabupaten/Kota
611213	Transfer DBH minyak bumi untuk Kab./Kota lainnya
611215	Transfer DBH SDA Minyak Bumi 0.5 % untuk Propinsi
611216	Transfer DBH SDA Minyak Bumi 0.5 % untuk Kab/Kota Penghasil
611217	Transfer DBH SDA Minyak Bumi 0.5 % untuk Kab/Kota Lainnya
611223	Transfer DBH Gas Bumi untuk Kab./Kota lainnya
611225	Transfer DBH SDA Gas Bumi 0.5 % untuk Propinsi
611226	Transfer DBH SDA Gas Bumi 0.5 % untuk Kab/Kota Penghasil
611227	Transfer DBH SDA Gas Bumi 0.5 % untuk Kab/Kota Lainnya
611233	Transfer DBH royalti untuk Propinsi
611234	Transfer DBH royalti untuk Kab./Kota Penghasil

Akun	Uraian
611235	Transfer DBH royalti untuk Kab./Kota lainnya
611244	Transfer DBH iuran tetap dan iuran produksi untuk Propinsi
611245	Transfer DBH iuran tetap dan iuran produksi untuk Kab./Kota Penghasil
611246	Transfer DBH iuran tetap dan iuran produksi untuk Kab./Kota Lainnya
611253	Transfer DBH PSDH untuk Propinsi
611254	Transfer DBH PSDH untuk Kab./Kota Penghasil
611255	Transfer DBH PSDH untuk Kab./Kota lainnya
611312	Transfer DBH Cukai Hasil Tembakau untuk Kabupaten/Kota
612112	Transfer DAU untuk Kabupaten/Kota
612113	Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah
613112	Transfer Dana Alokasi Khusus untuk Propinsi
613113	Transfer DAK untuk Kabupaten/Kota
622111	Transfer Dana Penyesuaian untuk Propinsi
622112	Transfer Dana Penyesuaian untuk Kabupaten/Kota
622113	Transfer Dana Penyesuaian Alokasi Cukai Hasil Tembakau untuk Propinsi Penghasil
622114	Transfer Dana Penyesuaian Alokasi Cukai Hasil Tembakau untuk Kabupaten/Kota Daerah Penghasil
622115	Transfer Dana Penyesuaian Alokasi Cukai Hasil Tembakau untuk Kabupaten/Kota Daerah Lainnya
622116	Transfer Dana Penyesuaian Insfrastuktur Sarana dan Prasarana



DIREKTUR JENDERAL,

Agus Suprijanto

1 AGUS SUPRIJANTO
NIP 19530814 197507 1 001 *AS*